

Dr. Nasihun Amin, M. Ag.
Moh. Masrur, M. Ag.

Agama & Adaptasi Sosial

Studi Kasus Penggusuran Lembaga-Lembaga Keagamaan
Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kota Semarang



Laporan Penelitian Kolektif Kolaboratif

Diblayai Dengan Anggaran DIPA LP2M
UIN Walisongo Semarang
Tahun 2018

LAPORAN PENELITIAN DASAR INTEGRASI KEILMUAN

**AGAMA DAN ADAPTASI SOSIAL:
Studi Kasus Penggusuran Lembaga-lembaga Keagamaan
Untuk Pembangunan Jalan Tol di Kota Semarang**



Disusun oleh :

Ketua : Dr. Nasihun Amin, M.Ag.
NIP : 196807011993031003
ID Peneliti : 200107680103753

Anggota : Moh. Masrur, M.Ag.
NIP : 197208092000031003
ID Peneliti : 2009087202033850

MENDAPAT BANTUAN DANA
BOPTN UIN WALISONGO SEMARANG
2018

ABSTRAKSI

Dalam rangka memajukan masyarakat, pembangunan infrastruktur, termasuk jalan tol, adalah merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, pembangunan ini ternyata juga mempunyai dampak yang kurang baik, terutama dari sisi sosial. Sebuah tatanan yang semula sudah kokoh, menjadi terganggu. Diantara yang mengalami kondisi demikian adalah lembaga-lembaga keagamaan.

Ada dua pokok persoalan utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran agama dalam mengatasi situasi penggusuran akibat pembangunan jalan tol dan apa strategi adaptasi sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi penggusuran akibat adanya pembangunan jalan tol.

Permasalahan ini diteliti dengan menggunakan metode wawancara terhadap pengurus dan masyarakat sekitar lembaga-lembaga keagamaan itu berada, dan observasi tentang berbagai aktivitas yang dilaksanakan;

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa lembaga-lembaga keagamaan di Kota Semarang tidak mempermasalahkan adanya proses pembangunan. Mereka akomodatif dan kooperatif. Karena menyadari bahwa sesungguhnya hal tersebut untuk hal yang lebih baik. Bahkan ada yang menyikapinya sebagai berkah. Walau demikian, lembaga-lembaga keagamaan tersebut harus mengatur strategi adaptasi agar bisa menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, mereka menggunakan strategi adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter persoalan yang dihadapi. Strategi ini yang lebih penting adalah aspek-aspek yang mendasarinya seperti kohesi sosial yang tetap terjaga, menjadi media untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial, tetap terjaga efisiensi aktivitas, semakin meningkat kuantitas dan kualitas, tetap terjaga integrasi pendidikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesanggupan, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan tugas penelitian ini.

Pembangunan infrastruktur jalan tol sebagai salah satu bentuk penyediaan sarana-prasarana transportasi publik saat ini memang dirasakan mendesak karena kapasitas jalan tol terutama di pulau Jawa, tidak sebanding dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk. Namun demikian, kebijakan ini tentu bukan tidak menimbulkan persoalan baru karena berbenturan dengan hajat hidup orang banyak.

Salah satu problem yang muncul sebagai akibat adanya pembangunan jalan tol adalah tercarbutnya berbagai aktivitas keagamaan yang telah mapan di masyarakat. Bagaimana pun pembangunan jalan tol tersebut pastilah menabarak berbagai lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah, pondok pesantren dan majlis taklim yang telah mapan. Namun demikian, lembaga-lembaga keagamaan tersebut tentu juga harus bersikap bijak mengedepankan kepentingan publik yang lebih besar.

Apa dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan tersebut agar tetap eksis dan bahkan berkembang menjadi lebih baik menjadi menarik untuk dilihat. Dari sini penelitian mengenai *Agama Dan Adaptasi Sosial Studi Kasus Penggusuran Lembaga-Lembaga Keagamaan untuk Pembangunan Jalan Tol di Kota Semarang* dilakukan.

Peneliti yakin bahwa penelitian ini tidak akan selesai dengan baik jika tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis merasa wajib untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Akhirnya, peneliti hanya bisa berdoa, untuk segala amal baiknya, semoga mendapat sebaik-baik balasan dari Allah Yang Maha Rahman, Maha Rahim.

Semarang, Oktober 2018

Peneliti,

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Surat Keterangan
Abstraksi
Kata Pengantar
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Masalah.....	11
C. Tujuan	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	19

BAB II PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PROSES ADAPTASI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

A. Pembangunan Masyarakat.....	24
B. Infrastruktur	32
C. Adaptasi Sosial	43

BAB III PEMBANGUNAN JALAN TOL DAN DAMPAKNYA BAGI LEMBAGA KEAGAMAAN DI KOTA SEMARANG

A. Pembangunan Jalan Tol di Kota Semarang.....	61
B. Profil Lembaga Keagamaan.....	69

BAB IV STRATEGI LEMBAGA KEAGAMAAN
MENGHADAPI DAMPAK PEMBANGUNAN
JALAN TOL DI KOTA SEMARANG

- A. Peran Agama dalam Membentuk Respon.....95
- B. Pola Strategi Lembaga Keagamaan.....116

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....130
- B. Saran-saran.....131

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan jalan tol, sebagai salah satu bentuk penyediaan sarana-prasarana transportasi publik, merupakan salah satu prioritas utama Program Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Karena kapasitas jalan tol terutama di pulau Jawa, tidak sebanding dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk. Salah satu problem rumit yang selalu mengemuka dalam kaitannya dengan pembangunan proyek jalan tol adalah masalah pembebasan tanah karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, tak terkecuali pula dinamika social yang terjadi di proyek pembangunan jalan tol berada di daerah Kota Semarang.

Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Dalam

hal ini, memang ada beberapa pihak yang belum dapat menerima ganti rugi yang diberikan oleh pengembang karena diperkirakan ganti ruginya masih terlalu rendah dengan situasi, kondisi, tanah, bangunan, dan fasilitas yang dimiliki.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa ada fenomena hubungan antara agama dan adaptasi sosial dalam mengatasi penggusuran untuk pembangunan jalan tol, karena fakta sosial menunjukkan adanya peran tingkah laku agama, terutama dalam lembaga sosial-keagamaan dan adaptasi sosialnya untuk mengatasi masalah penggusuran sebagai korban pembangunan jalan tol Semarang-Batang, baik yang berhubungan dengan komunitas sosial Musholla, Masjid, dan madrasah, serta lembaga pendidikan Islam lainnya.

Berbagai macam penelitian agama memang selalu aktual dan menarik. Meski telah banyak dilakukan penelitian dengan ragam sudut pandang, nyatanya agama, dengan sekelumit permasalahan yang mengitarinya, tetap menjadi tema penelitian yang senantiasa segar dan favorit bagi banyak pihak. Sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia agar selalu lurus dan tidak kacau, agama telah menjadi aspek yang sangat penting dalam diri seorang individu. Agama menuntun manusia untuk menjalani kehidupannya sekaligus mengikat manusia dengan Tuhan melalui akal dan hatinya.

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup selalu berinteraksi satu sama lainnya. Adanya interaksi sosial antar kebudayaan antar bangsa pada era globalisasi ini semakin mempercepat laju perubahan sosial. Dampak perubahan sosial

itu tidak saja menimbulkan kesenjangan antara nilai lama dengan nilai baru, tetapi juga menimbulkan kesenjangan antara hukum yang telah mapan dengan realitas sosial yang terus mengalami perubahan.

Perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Perubahan-perubahan itu terjadi baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial pada masyarakat dapat diketahui dengan cara membandingkan keadaan masyarakat pada waktu tertentu dengan keadaan di masa lampau. Melakukan studi perubahan sosial, maka harus dilihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi obyek yang menjadi perhatian studi, dan kemudian dilihat dari konteks waktu yang berbeda.

Keseimbangan sosial merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu hal di mana lembaga-lembaga masyarakat yang pokok berfungsi dalam masyarakat dan saling berintegrasi. Keadaan demikian membuat warga masyarakat merasa aman dan tenteram, oleh sebab tidak adanya pertentangan pada aturan-aturan yang berlaku. Setiap kali ada gangguan terhadap adanya keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya, atau merubahnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, keseimbangan tersebut pasti suatu saat akan mengalami gangguan akibat adanya berbagai perubahan dan pembangunan.

Salah satu penyebab keseimbangan tersebut mengalami gangguan adalah adanya program pembangunan infrastruktur. Di satu sisi, pembangunan ini adalah dalam rangka memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar aktivitas mereka semakin efisien dan efektif. Di sisi lain, adanya tata kehidupan masyarakat yang sudah mapan pada akhirnya mengalami gangguan. Kehidupan sosial yang telah terbentuk secara solid menjadi berubah karena warga masyarakatnya kemudian tercerai berai.

Salah satu pembangunan infrastruktur tersebut adalah pembangunan jalan tol. Pembangunan yang berupaya memberikan penyediaan sarana-prasarana transportasi public ini merupakan salah satu prioritas utama Program Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Hal ini wajar, karena kapasitas jalan tol terutama di pulau Jawa, tidak sebanding dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk. Keberadaan jalan tol baru tersebut diharapkan juga mampu bersinergi dengan jalan arteri, jalan konektor, yang sudah ada atau akan dikembangkan, sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan Tol Semarang-Batang.

Jalan Tol Batang–Semarang adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 75 kilometer yang menghubungkan daerah Batang dengan Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Jalan tol Semarang-Batang merupakan bagian jaringan jalan tol Trans Jawa yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah menyadari, bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan daya saing bangsa demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu di masa mendatang Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi sehingga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan jalan tol, khususnya terkait proses pembebasan lahan dan penyelesaian pembangunannya.

Pada hakekatnya, jika Pemerintah memerlukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan harus diusahakan agar tanah tersebut diperoleh dengan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Akan tetapi cara yang demikian tidak selalu dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan, karena ada kemungkinan pemegang hak atas tanah tersebut tidak bersedia melepaskan haknya ataupun jika mau melepaskan haknya, pemegang hak atas tanah dimaksud meminta ganti rugi atau harga atas tanah tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Dalam hal ini sering disebut sebagai ganti untung, bukan ganti rugi karena sebagian anggota masyarakat memperoleh ganti untung yang demikian tinggi jika dibanding dengan anggota masyarakat lain, bahkan jika dibanding dengan harga normalnya.

Salah satu problem rumit yang selalu mengemuka dalam kaitannya dengan pembangunan proyek jalan tol adalah masalah pembebasan tanah karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak milik lainnya.

Sebenarnya penggusuran terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, dan juga terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Penggusuran biasanya terjadi dalam skala besar, dimana sejumlah besar masyarakat dipaksa untuk pindah dari rumah tempat tinggalnya. Penggusuran juga biasanya ditujukan kepada orang miskin, penghuni liar atau pemukiman liar. Akibat yang terjadi terhadap korban penggusuran adalah sebuah bencana atau suatu korban pembangunan, mereka tidak memiliki tempat tinggal dan bahkan menjadi lebih miskin lagi. Dalam beberapa kasus, korban penggusuran bahkan tidak mendapatkan kompensasi maupun perumahan alternatif karena menempati tanah yang bukan haknya seperti di bantaran sungai dan atau menempati tanah milik Negara.

Namun tidak demikian dengan korban pembangunan jalan tol Semarang-Batang, sebab semua korban penggusuran menempati tanah hak milik pribadi, lembaga, tanah wakaf atau yayasan. Beberapa di antaranya adalah tanah dan bangunan

milik pribadi, baik yang tinggal di kawasan perumahan maupun non perumahan. Demikian pula, hak milik yang ada pada berbagai lembaga keagamaan seperti musholla, masjid, madrasah diniyah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, baik Taman Kanak-Kanak Islam, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah (Madin), bahkan milik negara seperti SMPN 16, Kota, Kota Semarang. Artinya, ada cukup banyak lembaga keagamaan yang terkena penggusuran akibat dibangunnya jalan tol ini.

Problem lain adalah justru dialami oleh para pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan tol. Problem utamanya bukan terletak pada aspek fisik, akan tetapi justru pada persoalan sosialnya. Banyak di antara mereka telah terjalin adanya sebuah kohesi sosial yang sangat baik, sehingga ketika wilayahnya terdampak pembangunan jalan tol, maka mereka menjadi tercerai berai yang mengakibatkan harus membangun proses readaptasi terhadap lingkungannya yang baru.

Bertitik tolak dari penggusuran ini tentu menyangkut agama sebagai fenomena sosial pada komunitas Muslim, baik pada siswa, orang tua siswa atau wali murid, para guru, pengurus yayasan, jamaah dan takmir musholla atau masjid, kelompok-kelompok pengajian, serta masyarakat Islam sekitar pada umumnya. Keberadaan berbagai lembaga keagamaan tersebut pada umumnya telah sedemikian mapan. Sehingga ketika lembaga-lembaga tersebut mengalami penggusuran, maka berbagai persoalan akan timbul. Sebagai

konsekuensinya, mereka semua perlu adaptasi sosial, baik mereka yang meninggalkan komunitasnya pada khususnya maupun komunitas yang ditinggalkannya pada umumnya.

Pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum dewasa ini menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); disusul Perpres No. 148 Tahun 2015 menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan proyek tol tersebut. Melalui kebijakan tersebut, dalam hal mekanisme pencabutan hak atas tanah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang secara kebetulan diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan tanah oleh Negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab,

yaitu untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, kuat dan hak penuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut.

Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan kewenangan dan tanggung jawab. Dinamika pembangunan nasional, seringkali menuntut Negara untuk melakukan penataan kembali atas tata ruang termasuk pemanfaatan tanah sedemikian rupa yang meminta masyarakat untuk menyerahkan tanahnya kepada Negara untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pembangunan prasarana jalan raya, MRT, jalan layang, jalan tol, kawasan industri, pertanian dan sebagainya adalah beberapa di antara dasar legitimasi yang digunakan oleh Negara dalam pengambil-alihan tanah masyarakat. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Dalam hal ini, memang ada beberapa individu yang belum dapat menerima ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengembang karena diperkirakan ganti ruginya masih terlalu rendah dengan situasi, kondisi, tanah, bangunan, dan fasilitas yang dimiliki.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa ada fenomena hubungan antara agama dan adaptasi social. Apa yang semula sudah kokok dalam kaitannya dengan kehidupan keberagamaan seperti praktek keberagamaan, lembaga-lembaga keagamaan kemudian mengalami perubahan akibat adanya pembangunan infrastruktur yang berupa jalan tol. Dengan demikian memerlukan adanya sebuah proses adaptasi. Proses ini sesungguhnya merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri dalam lingkungan sosial. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, jadi dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan pribadi. Menurut Suparlan, adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan.

dalam mengatasi penggusuran untuk pembangunan jalan tol, karena fakta sosial menunjukkan adanya peran tingkah laku agama, terutama dalam lembaga sosial-keagamaan dan adaptasi sosialnya untuk mengatasi masalah penggusuran sebagai korban pembangunan jalan tol Semarang-Batang, baik yang berhubungan dengan komunitas sosial Musholla, Masjid, dan madrasah, serta lembaga pendidikan Islam lainnya.

Bertitik tolak dari latar belakang ini, maka perlu adanya sebuah penelitian mengenai *Agama dan Adaptasi Sosial Studi Kasus Penggusuran Lembaga-lembaga Keagamaan untuk Pembangunan Jalan Tol di Kota Semarang*

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, dapatlah dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa peran agama bagi lembaga-lembaga keagamaan untuk mengatasi situasi penggusuran jalan tol Semarang-Batang?
2. Bagaimana strategi adaptasi sosial yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan dalam mengatasi penggusuran jalan tol Semarang-Batang?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mengetahui peran agama bagi lembaga-lembaga keagamaan untuk mengatasi situasi penggusuran jalan tol Semarang-Batang.
2. Untuk mengetahui strategi adaptasi sosial masyarakat beragama dalam mengatasi penggusuran jalan tol Semarang-Batang.

Adapun signifikansi penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangsih teoritis untuk membaca fenomena peran agama dan adaptasi sosial yang secara spesifik membahas mengenai masyarakat yang terkena imbas penggusuran jalan tol.
2. Secara praktis, penelitian ini turut memberikan ruang bagi peneliti khususnya dan para *researcher* untuk *concern*

terhadap dinamika aktual yang sedang berkembang terkait dengan penggusuran warga akibat pembangunan jalan tol.

D. Tinjauan Pustaka

Setelah menelaah beberapa kajian pustaka terkait dengan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan untuk dijadikan titik tolak dalam membuat distingsi penelitian yang lebih lanjut. Penelitian tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh Rohani Budi Prihatin dengan mengangkat tema Fenomena Penggusuran di Jakarta.¹ Dalam observasinya, dia menerangkan bahwa penggusuran sebagai bagian dari usaha relokasi penduduk menjadi masalah klasik yang dihadapi pemerintah. Konflik yang ditimbulkan dalam setiap usaha menata ulang kota merupakan cermin lemahnya perencanaan tata ruang kota. Baginya, pemprov perlu menekankan upaya menjadikan Ibu kota sebagai kawasan yang nyaman dan mampu mendukung kehidupan warganya. Untuk itu, Pemprov sudah seharusnya mengedepankan transparansi dalam mengkomunikasikan setiap rencana tata ruang kota. Pejabat pemerintah harus memaparkan rencana tata ruang wilayah agar masyarakat mengerti dan memahami mengapa diperlukan upaya penggusuran tersebut.

¹Rohani Budi Prihatin, "Fenomena Penggusuran di Jakarta." dalam Info Singkat Kesejahteraan Sosial, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/Sept/2014, hlm.12

Selanjutnya Mohammad Paurindra Ekasetya melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”. Penelitian yang merupakan studi kasus Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes² ini menyimpulkan bahwa, 1) Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Brebes kurang sesuai dengan PerPres No.36 tahun 2005 Jo. PerPres No.65 Tahun 2006 terutama dalam pemberian ganti rugi yang hanya berpedoman pada NJOP saja, bukan pada variabel-variabel yang mempengaruhi harga tanah dan harga pasaran, 2) Adapun kendala yang dihadapi diantaranya: jual-beli lahan secara bebas, proses waris tanpa balik nama, kepemilikan *absentee*, dan tidak adanya kesepakatan harga para pihak, upaya yang dilakukan panitia pengadaan tanah: melakukan musyawarah mufakat, mediasi, dan memberikan pemahaman mengenai fungsi sosial tanah. Saran dari penelitian ini adalah (1) (1) Disarankan agar pemerintah daerah khususnya kantor pertanahan memberikan pemahaman mengenai perpres No. 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah, (2) Disarankan agar panitia pengadaan tanah dalam menetapkan ganti rugi tidak hanya berpedoman pada NJOP, (3) Disarankan kepada masyarakat yang tanahnya

²Mohammad Paurindra Ekasetya, “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes,” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015, hlm. viii.

terkena pembangunan Jalan Tol Trans Jawa agar tidak menuntut ganti rugi yang terlalu tinggi.

Penelitian yang senada juga dilakukan oleh Paula Suwaty. Paula melakukan studi kasus Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan memfokuskan penelitiannya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat dalam pelepasan hak atas tanah.³ Hasil penelitiannya menunjukkan: 1) Mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu tahap perencanaan berupa menentukan panjang dan lebar ruas jalan tol dan luas tanah yang dibutuhkan, tahap persiapan terdiri dari pembentukan tim satgas, sosialisasi, pendataan awal lokasi, konsultasi publik, surat keputusan penetapan lokasi, tahap pelaksanaan terdiri dari pengumpulan data kepemilikan tanah, validasi data kepemilikan, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan dan bentuk ganti rugi, pemberian ganti kerugian dan tahap penyerahan hasil. 2) Hambatan dalam mekanisme pelepasan hak atas tanah yaitu proses pendataan kepemilikan tanah warga, ketidaktepatan waktu warga dalam mengumpulkan data kepemilikan tanah, dan bukti kepemilikan tanah warga. 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap proaktif masyarakat

³Paula Suwaty, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016, hlm. 2.

yaitu, kebijakan ganti rugi yang menguntungkan, pemahaman terhadap pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum, kualitas layanan publik, peran kepala desa, dan pemaksaan atau takut pada sanksi yang berlaku.

Sementara itu, penelitian Alghiffari Aqsa menunjukkan bahwa 84% (97 kasus) penggusuran dilakukan tanpa melalui prosedur musyawarah dengan warga. Hanya 16% penggusuran yang melalui musyawarah dan 1 kasus yang membongkar dengan sukarela menunjukkan bahwa pembangunan di DKI Jakarta masih jauh dari partisipasi masyarakat dan masih meminggirkan orang yang lemah dan miskin. Hal ini membuat DKI Jakarta jauh tertinggal dari banyak negara, sebagai contoh Thailand yang sudah lebih dari dua dekade menerapkan pembangunan yang partisipatif bagi kelompok masyarakat urban, terutama kelompok masyarakat yang dianggap tinggal di daerah kumuh ataupun liar. Ketiga penelitian tersebut tidak ada satu pun yang membahas dari aspek agama dan keagamaan. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki orisinalitas dalam hal membaca fenomena penggusuran tersebut dari sudut lensa sosiologi agama. Peneliti meyakini bahwa penelitian ini akan menjadi bagian dari kontribusi positif dalam memberikan kerangka pijak untuk memfungsikan agama dalam ranah perbaikan sosial masyarakat ketika terjadi suatu ketimpangan sosial.⁴

⁴Aqsa, Kata Pengantar Direktur LBH Jakarta, dalam “Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015”, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2016, hlm. i.

Penelitian lain adalah yang dilakukan oleh Siti Manggar F, “Penggusuran sebagai Implikasi Kebijakan ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Ham: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi Dan Berwibawa”, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Dari penelitiannya diketahui bahwa penggusuran sebagai implikasi dari kebijakan ruang terbuka hijau di Taman BMW menjadi ironi karena sebelumnya taman tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh karena kurangnya perhatian pemerintah, sehingga menyebabkan warga menempati lahan tersebut untuk mendirikan tempat tinggal dan mencari kehidupan yang layak bagi mereka. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun sampai akhirnya pemerintah melalui surat perintah bongkar melakukan penggusuran paksa kepada warga penghuni Taman BMW, dan kepada warga Papanggo Ujung yang bahkan tidak pernah mendapatkan sosialisasi perihal penggusuran tersebut.⁵

Rulli Pratiwi Setiawan dalam Seminar Nasional Perumahan Permu-kiman dalam Pembangunan Kota 2010, Jurusan Arsitektur ITS, Maret 2010 menyampaikan tulisannya yang berjudul “Penggusuran Permukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanis-me”, Tulisan ini berupaya mengulas masalah penggusuran terhadap permukiman liar di Stren Kali Jagir beberapa waktu yang lalu, serta pandangan terhadap penanganan terhadap penggusuran

⁵Siti Manggar F, “Penggusuran sebagai Implikasi Kebijakan ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif Ham: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi Dan Berwibawa”, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No. II Oktober 2011: hlm. 226.

tersebut. Kesimpulan yang dapat digarisbawahi adalah konsep “community participation” yang perlu dipertimbangkan dalam proses “resettlement”. Mengelola proses permukiman kembali dengan cara partisipatif ini dapat meminimalkan konflik yang sering terjadi dan dapat menjaga kehidupan masyarakat dan jaringan sosial yang telah terbangun.⁶

Sementara itu Sonny Djoko Marlijanto meneliti untuk penyelesaian program masgisternya di UNDIP tentang *Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang–Solo Di Kabupaten Semarang*. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa 1) Mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang – Solo Di Kabupaten Semarang disebabkan tidak adanya titik temu, sehingga proses di pengadilan-lah yang bisa menyelesaikan. 2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam mekanisme konsinyasi ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan.⁷

⁶Rulli Pratiwi Setiawan, “Penggu-sur-an Permukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme”, dalam Seminar Nasional Perumahan Permu-kiman dalam Pembangunan Kota 2010, Jurusan Arsitektur ITS, Maret 2010, hlm. 1

⁷Sonny Djoko Marlijanto, “Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL Semarang–Solo Di Kabupaten Semarang),Tesis S2, Undip, Program Studi Magister Kenotariatan Pro-gram Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010, hlm. 9.

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang berusaha mengungkapkan pembangunan jalan tol dalam kaitannya dengan aspek-aspek keagamaan, khususnya lembaga-lembaga keagamaan. Dengan demikian diapandang perlu untuk melakukan penelitian tersebut untuk melengkapi khazanah yang diperlukan dalam kajian mengenai pembangunan jalan tol.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni digunakan apabila peneliti ingin memahami kondisi objek yang diteliti secara lebih mendalam dan sulit diungkapkan secara kuantitatif, berdasarkan pandangan subyek yang diteliti. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian. Jadi, pendekatan kualitatif merupakan suatu mekanisme kerja penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kata, atau kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.⁸

Adapun pendekatannya adalah pendekatan fenomenologis seperti yang diungkapkan oleh Edmund

⁸Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 52.

Husserl dan Alfred Schultz bahwa kita harus kembali kepada benda-benda itu sendiri. Objek-objek harus diberikan kesempatan untuk berbicara melalui deskripsi fenomenologis guna mencari hakekat gejala-gejala. Jadi, peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kiatannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu.⁹

Selain mereka berdua, ada juga pengaruh Weber yang memberi tekanan pada *verstehen*, yaitu pengertian *interpretative* terhadap pemahaman manusia. Inkuiri fenomenologis dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk mengungkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Yang ditekankan dalam pendekatan fenomenologis adalah aspek subyektif perilaku orang. Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari.¹⁰

Secara tegas, pendekatan fenomenologi hanya berkuat dengan pengalaman subjektif partisipan dalam kehidupan sehari-hari apa adanya. Meskipun bertolak dari pengalaman subyek penelitian dalam menjalani hidup sehari-hari, tetapi pendekatan fenomenologi tidak berhenti pada pengalaman itu. Bertolak dari pengalaman itulah

⁹Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 65-66.

¹⁰Yanuar Ikbar, *Metode...* hlm. 66.

dirumuskan hakekat fenomena. Peneliti mesti membuat kesimpulan tentang hakekat pengalaman, penghayatan spiritualitas dan pemaknaan atas fenomena dimaksud menurut subyek penelitian secara utuh.¹¹

2. Sasaran Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berusaha melihat proses adaptasi sosial yang dilakukan oleh berbagai lembaga keagamaan yang ada di Kota Semarang karena terdampak oleh proses pembangunan jalan tol yang berupa penggusuran.

Adapun yang dimaksud dengan lembaga keagamaan di sini adalah berbagai organisasi yang menyelenggarakan berbagai aktivitas keagamaan seperti pendidikan agama, peribadatan. Beberapa lembaga keagamaan tersebut secara khusus adalah Masjid Baitul Mustaghfirin, Beringin Kulon, Pondok Pesantren YPMI al-Firdaus, TK Pembina ABA 54 dan Majelis Taklim MUhammadiyah Ngaliyan.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang fenomena kehidupan sosial keagamaan

¹¹Lihat Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif IPS*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2013), hlm. 136.

dan keharmonisannya di wilayah Kota Semarang, faktor-faktor yang mendukung dan mengambatnya, serta bentuk-bentuk komunitas sosial yang ada. Selain itu digunakan pula untuk mengetahui persepsi dan pandangan berbagai pihak tertentu, seperti ustadz, kyai, ulama', dan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dalam program pembinaan kehidupan sosial keagamaan di Kota Semarang, baik sebelum maupun setelah pembangunan jalan tol Semarang-Batang.

b. Observasi

Metode ini dipergunakan untuk merekam lingkungan fisik dan sosial keagamaan di Kota Semarang. Suasana lingkungan kehidupan agama, lembaga-lembaga keagamaan, musholla, masjid, madrasah diniyah, madrasah Ibtidaiyah, sekolah-sekolah, dan komunitas lain yang relevan, serta berbagai macam kegiatan sosial-keagamaan dan lembaga keagamaan yang tumbuh dan berkembang pada komunitas ummat beragama di Kota Semarang.

c. Teknik pencatatan

Teknik ini dipergunakan untuk merekam data-data monografi berupa struktur lembaga, daftar kegiatan, grafik, laporan-laporan dan data-data tertulis lainnya yang tidak terekam melalui teknik wawancara dan observasi.

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus dan rumusan masalah. Data-data tersebut terdiri atas dua jenis, yaitu data yang bersumber dari manusia dan data bersumber dari non manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan di dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi subyek penelitian. Sedangkan data non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto atau video, dan hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.¹²

5. Analisis Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis datanya pun menggunakan analisis kualitatif yaitu sebuah model analisis non statistik. Data-data yang didapatkan dari informan diolah data dan analisis meliputi tiga kegiatan: deskripsi, formulasi dan interpretasi.¹³ Deskripsi dimulai dari menggambarkan fenomena dan merentangnya ke dalam berbagai kategori, memilah-milah data berdasar substansi temuan dan pada saat yang sama juga dilakukan reduksi data. Data yang tidak relevan dengan permasalahan akan dibuang, sehingga data yang diambil hanya data yang

¹²Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 58.

¹³Sunyoto Usman. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Cired, 2004, hlm. , 99-101..

berkaitan dengan masalah yang diteliti saja. Setelah itu, dilakukan formulasi dengan cara melihat kecenderungan-kecenderungan, mencari hubungan asosiasional. Dari data yang telah ada kemudian dimaknai. Semua proses pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara siklis. Jika pada waktu analisis, datanya dianggap kurang, maka pengumpulan data bisa dilakukan lagi. Pola demikian akan berlangsung terus sampai dengan penelitian dianggap selesai.

F. Jadwal

Kegiatan penelitian ini secara keseluruhan dibagi dalam tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan. Tahap ini berisi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan beberapa perumusan rancangan dan instrumen penelitian serta seleksi berbagai sumber rujukan sehingga pada tahap pelaksanaan di lapangan menjadi lebih efisien. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat juga akan dilakukan survey awal dan sekilas tentang calon lokasi penelitian. Kegiatan ini memakan waktu sekitar 1 bulan.

Kedua, tahap pelaksanaan. Tahap ini berisi kegiatan pengumpulan data-data di lapangan. Dalam waktu yang bersamaan data-data ini juga diolah melalui kategorisasi-kategorisasi serta *crosscheck* data untuk mendapatkan data yang benar-benar valid untuk kemudian diadakan analisis. Tahap ini akan memakan waktu selama kurang lebih 2 bulan.

Ketiga, tahap pelaporan. Tahap ini berisi kegiatan penulisan seluruh rangkaian proses penelitian dalam bentuk

laporan akhir secara tertulis, ekspose hasil penelitian untuk mendapatkan berbagai masukan dan kritik dari pihak terkait agar mendapatkan hasil yang lebih baik, revisi penulisan laporan dan pencetakan laporan.

BAB II

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PROSES ADAPTASI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT

A. Pembangunan Masyarakat

Pembangunan sesungguhnya merupakan perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk menuju ke arah yang lebih baik berdasarkan norma, nilai dan pengetahuan tertentu. Usaha demikian ini bisa dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Bisa juga merupakan peraduan kerjasama diantara tiga kompoenen tersebut. Dengan demikian bisa dipahami bahwa pembangunan masyarakat merupakan upaya sadar masyarakat untuk merubah kondisi mereka menjadi lebih baik.

Untuk menjelaskan mengenai kondisi yang lebih baik tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah karena meliabtakan sedemikian banyak perangkat: ada prioritas-prioritas yang menjadi pilihan, ada indikator-indikator yang jadi tolok ukur, serta sedemikian banyak jenis data yang menjadi faktor pendukung. Penggunaan perangkat-perangkat tersebut akan melahirkan berbagai perbedaan justifikasi terhadap perubahan kondisi tersebut apakah lebih baik ataukah tidak.

Yang pasti bahwa kondisi yang lebih baik bisa dilihat dari peningkatan aset dan kapabilitas. Untuk hal pertama bisa

dilihat dari peningkatan kepemilikan dan penguasaan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kualitas hidup yang berkemajuan. Sedangkan untuk hal kedua dilihat dari kemampuan mengidentifikasi berbagai problema yang dihadapi sekaligus juga mendapatkan alternatif solusinya. Demikian pula mampu menciptakan dan menggunakan berbagai peluang yang ada di sekelilingnya.

Di berbagai negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia program pembangunan masyarakat lebih banyak terpusat pada isu kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal demikian karena penduduk miskin yang ada di negara tersebut masih relatif banyak dan rentan dengan kondisi krisis ekonomi. Disamping itu negara-negara berkembang juga masih berhadapan dengan problem kebodohan yang mengakibatkan proses pembangunan masyarakat tidak berjalan dengan cepat.

Ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan dalam setiap aktivitas pembangunan masyarakat. *Pertama*, strategi *enabling* yaitu pihak pemerintah atau swasta memfasilitasi sumber daya (*resources*), baik dalam bentuk ide, dana, material, dan segala sesuatunya yang mendukung. Kedua pihak ini menjadi pusat dan tampil dominan dalam perencanaan hingga implementasi program pembangunan. Strategi ini bisa digunakan, ketika masyarakat setempat belum memiliki sumber daya yang memadai dalam melakukan pembangunan. *Kedua*, strategi *empowering* yaitu usaha melakukan perubahan, dengan memposisikan antara masyarakat dan pemerintah atau swasta

sejajar, sehingga berjalan bersamaan. Tidak hanya pihak swasta atau pemerintah yang aktif dalam pembangunan, akan tetapi masyarakat juga berperan aktif di dalamnya. *Ketiga*, strategi *delegating* yaitu masyarakat lebih dominan dalam pembangunan dibandingkan dengan pemerintah dan swasta. Pemerintah atau swasta lebih berperan sebagai pendorong dan pendukung bagi masyarakat.¹

Dari penjelasan di atas bisa ditangkap bahwa pembangunan masyarakat berhubungan erat dengan upaya untuk menjadikan kehidupan lebih sejahtera. Hidup sejahtera merupakan keadaan yang diinginkan bagi setiap masyarakat. Kesejahteraan dapat diartikan sebuah kondisi masalah sosial mampu diselesaikan dengan baik. Kebutuhan hidup dapat terpenuhi dan peluang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan kehidupan sejahtera, tiap lapisan masyarakat mencoba ikhtiar yang bermacam-macam. Ada beberapa kelompok yang mampu mencapai kesejahteraan seakan tanpa sebuah hambatan berarti. Sementara ada kelompok lain yang menghadapi hambatan yang begitu berat, bahkan tidak ada jaminan mereka dapat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain masyarakat golongan ini hidup di bawah garis standar, juga dalam keadaan yang sangat rentan. Kondisi ini sangat lazim ditemui di negara berkembang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kehidupan sejahtera, mereka perlu diprioritaskan.

¹Sunyoto Usman, *Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 7

Negara penganut *welfare state* memiliki sebuah tanggung jawab, sehingga Negara memberikan jaminan kesejahteraan bagi kaum yang lemah ini, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Indonesia secara konstitusional mengambil peran untuk membela kaum ini dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, akan tetapi kondisi masih belum cukup memungkinkan. Oleh karena itu, perwujudan kesejahteraan, terutama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara rakyat, swasta, dan pemerintahnya. Hal ini juga telah menjadi rumusan dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial.

Perwujudan kesejahteraan sosial secara konstitusional juga melibatkan pihak di luar negara. Hill menjelaskan bahwa negara bukan satu-satunya pihak yang berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan sosial.² Secara lebih rinci ia mendeskripsikan tentang pihak yang memiliki peranan dalam pelayanan dan perlindungan social untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Unsurnya adalah (1) asosiasi sukarela yang dapat meliputi kelompok swadaya, lembaga sukarela independen, lembaga sukarela kuasi pemerintah dan lembaga nonprofit kuasi pemerintah, (2) lingkungan tetangga dan rumah tangga dari kalangan menengah ke atas dan solidaritas tetangga, (3) pasar, dalam bentuk usaha bisnis yang bersifat privat dan (4) Negara, berrupa pelayanan umum.³

²Michael Hill, *Understanding Social Policy*, London: Blackwell Publishers, 1997, hlm. 2

³Michael Hill, *Social Policy: a Comparative Analysis*, London: Harvest Wheatsheaf, 1996, hlm. 129

Dalam konteks negara Indonesia, realitas kehidupan usaha pemenuhan hidup yang berkesejahteraan sudah banyak dijumpai. Bukan hanya negara sendiri yang menyelenggarakan usaha pemenuhan kesejahteraan, tetapi juga masyarakat dan swasta. Baik itu dari pihak perseorangan maupun dalam wadah sebuah organisasi sosial. Hal ini sangat wajar, mengingat permasalahan kesejahteraan cukup kompleks, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Pembahasan ini tidak menitik beratkan terhadap masalah-masalah sosialnya, tetapi berfokus kepada organisasi-organisasi sosial yang ikut mengambil peran membantu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Di dalamnya tentu saja juga lembaga-lembaga keagamaan sebagai representasi organisasi sosial. Untuk mewujudkan kehidupan sejahtera, hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah kelemahan dan kendala yang dihadapi, untuk mendapatkan solusi yang tepat. Maka dari itu, analisis ini akan dimulai dari upaya mengidentifikasi kelemahan dan kendala yang menghambat terwujudnya masyarakat hidup sejahtera.

Organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial menjadi tugas utama departemen sosial, meskipun realitanya pihak yang menjalankan fungsi tidak hanya dari satu institusi saja. Institusi lain yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial seperti departemen kesehatan, pertanian, pendidikan, tenaga kerja, bahkan BKKBN. Lebih dari itu, Badan Usaha Milik

Negara, seperti Askes, Jamsostek, dan Taspen juga menjalankan fungsi kesejahteraan sosial.

Karena organisasi pelayanan pemerintah, maka pada umumnya organisasi cukup mapan. Sebab, selain didesain menjadi bagian dari birokrasi, juga sebagai petugas pelaksanaannya. Ditunjang dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas ditanggung oleh pemerintah. Kelebihan dari organisasi pemerintah ini adalah anggaran untuk membiayai kegiatan operasional organisasi sudah tersedia dalam anggaran APBN atau APBD atau sumber dana lainnya.

Walaupun terdapat banyak kekuatan dan kelebihan organisasi yang menjadi bagian dari pemerintah, ternyata juga memiliki kelemahan. Karena organisasi pelayanan sosial merupakan bagian dari pemerintah, maka pelaksanaan kegiatannya juga ikut dalam pola dan cara kerja birokrasi. Tidak jarang proses pelayanan sosial membutuhkan pendekatan yang luwes tanpa aturan-aturan kaku dari birokrasi. Selain itu, kegiatan hanya berorientasi target-target fisik dan kurang memperhatikan kondisi lapangan yang ada. Ini bisa menyebabkan pelaksanaan lebih berpaku pada jumlah klien yang telah dilayani, jumlah anggaran yang sudah dikucurkan, bukan berorientasi jumlah klien yang berhasil diantarkari masalah-masalah sosial. Ironisnya lagi, karena bernaungan dengan birokrasi yang memiliki aturan kaku, petugas yang berlatar belakang profesi pekerjaan sosial, tidak dapat optimal dalam menyalurkan kemampuannya.

Kelemahan selanjutnya adalah kenyataan organisasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan sosial dari berbagai departemen begitu banyak. Praktik di lapangan pun menunjukkan bahwa banyak dijumpai adanya duplikasi yang mengakibatkan pelayanan sosial tidak efisien. Selain itu, organisasi pelayanan sosial pemerintah bergerak sangat tergantung dana dari anggaran pemerintah, sehingga aktivitas pelayanan berjalan dengan adanya anggaran pemerintah. Contoh kasusnya dapat dilihat dari beberapa panti pelayanan sosial di provinsi yang tidak berfungsi, sebagai akibat dari urusan pelayanan sosial diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Organisasi dari masyarakat yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibedakan menjadi tiga; institusi masyarakat lokal, organisasi yang bergerak berdasarkan motivasi, filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga organisasi merupakan organisasi sosial yang tidak beraffiliasi dari pemerintah, karena lahir atas prakarsa masyarakat sendiri dan di luar sektor swasta, sehingga bergerak bukan berdasarkan profit semata. Sebetulnya ketiga organisasi masyarakat ini merupakan organisasi yang melakukan pelayanan sosial dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Organisasi masyarakat yang bersifat local tumbuh sebagai bentuk aktualisasi dari pranata sosial dan sering pula didasarkan pada ajaran agama. Kondisi semacam ini, didorong oleh motivasi sosial dan religius. Realitas yang ada, terdapat organisasi local yang menjalankan sebagai pelayanan sosial

untuk pemenuhan kebutuhan air minum, air irigasi, dan jaminan sosial seperti umbung paceklik, perumpulan kematian, dan pemeliharaan orang tua. Organisasi masyarakat banyak berorientasi pada ikatan lokalitas, ikatan keakraban, ikatan patron klien, prinsip timbal balik, dan solidaritas sosial. Organisasi yang berbasis masyarakat seperti ini biasanya memiliki kepemimpinan dan eksistensi yang kuat serta melibatkan banyak warga masyarakat dalam komunitas tertentu.

Walaupun organisasi ini bisa bergerak lebih fleksibel, tetapi pengelolaan terkadang tidak cukup efisien, sebab bersifat informal dan belum menggunakan manajemen yang rasional. Sesuai dengan karakteristiknya, institusi lokal dan tradisional memang efektif sebagai sarana mendorong sebuah kegiatan bersama. Organisasi masyarakat ini kurang efisien, dilihat dari sumber daya. Ini perlu sebuah pengembangan, tidak mengubah organisasi informal menjadi organisasi formal, tetapi tetap mempertahankan ikatan lokal dan kepemimpinannya. Organisasi ini perlu ditambah sumber daya yang paham dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Sekitar lingkungan masyarakat telah tumbuh juga organisasi sosial yang memberikan fungsi pelayanan sosial didorong prinsip filantropi. Organisasi ini ada yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat luas dan tetap memberikan pelayanan secara terus-menerus, seperti PMR. Kelebihan organisasi ini adalah lingkup aktivitas pelayanan sosialnya tidak terbatas wilayah lokal dan keakraban saja.

Kelemahannya adalah pola kegiatan yang temporer seperti menggalang bantuan bagi korban bencana alam. Perkembangan organisasi sosial ini membutuhkan dukungan keberadaan nilai kemanusiaan yang universal.

Masyarakat memiliki energi dan potensi yang luar biasa. Hanya saja aktualisasi kegiatannya masih bersifat insidental. Kegiatan penyaluran sosial seperti ini, sebetulnya juga baik untuk dilakukan dalam sehari-harinya, karena masyarakat terdapat berbagai masalah yang butuh perhatian intensif. Perkembangan positif dari organisasi perwujudan kepedulian sosial yang merupakan aktualisasi dari nilai filantropi. Pada mulanya pelaksanaan kepedulian sosial bersifat insidental dan karikatif, makin berkembang dan mudah untuk dijumpai.

Organisasi masyarakat perlu sebuah institusi perantara yang membantunya meningkatkan potensi masyarakat dalam menyalurkan bantuan berdasarkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial filantropi. Institusi perantara juga perlu modal dibidang penguasaan jaringan dan kepercayaan sebagai lembaga yang bergerak dibidang media massa dengan misi khusus dalam kesejahteraan sosial. Institusi perantara ini dapat membantu untuk menyampaikan persoalan kelompok penyandang masalah.

B. Infrastruktur

Upaya pembangunan masyarakat untuk meningkatkan kehidupan yang lebih sejahtera, di mana pun, selalu saja tidak bisa dilepaskan dari pembangunan infrastruktur mengingat ia menjadi sarana penunjang untuk berbagai perubahan. Infrastruktur lazim memiliki dua kategori yaitu; *pertama*, *public utilities* (fasilitas umum) yaitu berbagai sarana dan fasilitas umum seperti pipa gas, saluran air bersih, sanitasi serta pengelolaan limbah, dan lain sebagainya. *Kedua*, *public works* (pekerjaan umum), seperti jalan, jembatan, rel kereta api, saluran *drainage*, dan lainnya. Secara keseluruhannya, sistem layanan ini berfungsi untuk memberikan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kendati demikian, masyarakat memandang terhadap infrastruktur, secara sederhana dilihat sebatas pembangunan fasilitas fisik saja.

Berkaitan dengan hal ini Grimsey, Darrin dan Mervyn K. Lewis dalam *Public Private Partnerships the Worldwide Revolution in Infrastructure Provision And Project Finance* sebagaimana disitir oleh Sunyoto Usman menyatakan bahwa ada tiga pihak yang menjalankan provisi dan utilisasi infrastruktur dalam aktivitas pembangunan masyarakat yaitu pemerintah, swasta, masyarakat atau kerjasama antara ketiganya. Pihak-pihak pelaksana ini, biasanya terbentuk skema sebagai berikut; skema *public obligation* (kewajiban pemerintah), skema *public-private partnership* (kerja sama pemerintah-swasta), skema *corporate social responsibility* (sebagai bagian dari tanggung jawab swasta), atau diinisiasi dan dibangun oleh masyarakat sendiri (*community-based*

infrastructure). Skema *public service obligation*, berfokus pada provisi dan utilisasi infrastuktur skala besar. Ini artinya provisi dan utilisasi infrastuktur membutuhkan dana besar, material mahal dan teknologi canggih. Oleh sebab itu, harus dipegang pemerintah dengan anggaran dana yang besar. Skema *public-private partnership* fokus terhadap provisi dan utilisasi infrastruktur dengan perencanaan dan implementasinya melibatkan investasi swasta. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator, dan swasta berperan sebagai investor. Skema *corporate social responsibility/CSR* biasanya fokus terhadap provisi dan utilisasi infrastruktur yang dibangun dalam rangka mendorong swasta berpartisipasi aktif dalam aktivitas pembangunan masyarakat sekitarnya.⁴ Adanya partisipasi ini, diharapkan juga mampu menciptakan hubungan harmonis antara swasta dengan pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya skema *community-based infrastructure* fokus pada provisi dan utilisasi infrastuktur yang berskala kecil dan menengah. Skema ini diharapkan dapat dijalankan oleh sumber daya masyarakat (mandiri), meski ada kemungkinan memperoleh dukungan dana dan material dari pemerintah atau swasta.

Untuk memahami secara tepat mengenai konsep infrastruktur dalam pembangunan masyarakat memang harus dilakukan secara tepat. Dalam hal ini, konsep infrastruktur dan pembangunan masyarakat setidaknya memiliki empat pendekatan, yaitu infrastruktur sebagai wacana (*discourse*),

⁴Sunyoto Usman, *Esai-esai Sosiologi*, hlm. 3.

infrastruktur sebagai produk (hasil rekayasa teknik), infrastruktur sebagai fasilitas pendukung kegiatan pembangunan (*as a development support facility*), infrastruktur sebagai agen perubahan (*as an agent of change*). Setiap pendekatan ini terdapat elemen-elemen yang beragam, sehingga arah pembahasan cukup kompleks.

1. Infrastruktur sebagai wacana

Sebagai sebuah wacana, pendekatan ini berupaya mengembangkan analisis bagaimana sebuah pola interaksi perbincangan (*spoken interaction*) dan teks tertulis (*written text*) tentang infrastruktur dipergunakan untuk menciptakan opini yang mampu mempengaruhi konstruksi berpikir masyarakat. Ia dikategorikan sebagai symbol yang sarat makna. Perbincangan dan teks tentang infrastruktur dalam ruang netral, tetapi sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik. Ambillah contoh sebuah negara merencanakan pembangunan jembatan yang menghubungkan sebuah pulau dengan pula lain. Jembatan yang amat hebat, berteknologi tinggi, bahkan mungkin terpanjang di dunia. Pejabat tinggi negara menyatakan meningkatkan fasilitas dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu investasi mampu menopang pembangunan wilayah. Jembatan boleh jadi masih menggunakan tenaga ahli asing, tetapi akan menjadi transfer pengetahuan kepada tenaga dalam negeri. Rencana dan pernyataan pejabat tinggi negara disosialisasikan melalui radio, televise, koran, majalah, rapat-rapat resmi dan media sosial.

Pendekatan wacana, rencana dan pernyataan pejabat tinggi negara diletakkan sebagai *spokeninteraction* dan *written text* tentang infrastruktur tidak berada dalam ruangan netral. Dalam pendekatan kritis, simbol-simbol dan makna-makan tersebut bukan sekedar informasi tentang kebijakan dan program pembangunan, tetapi berlit dengan kepentingan ekonomi dan politik. Lalu apa yang membedakan pendekatan wacana kritis terhadap infrastruktur dengan pendekatan-pendekatan yang lain telah didiskusikan sebelumnya? Sedikitnya terdapat dua perbedaan. *Pertama*, pendekatan wacana tentang infrastruktur memberikan tekanan pada dimensi social dan historis di balik provisi dan utilisasi infrastruktur. Sementara itu, pendekatan-pendekatan itu memberikan tekanan pada dimensi teknologi dan ekonomi. *Kedua*, pendekatan wacana kritis tentang infrastruktur menonjolkan kepentingan ekonomi dan politik dari kegiatan provisi dan utilisasi infrastruktur, sementara itu pendekatan-pendekatan lain lebih menonjolkan manfaat infrastruktur bagi masyarakat. Ujung kepentingan ekonomi dan politik adalah meraih, mengembangkan dan mempertahankan kekuasaan. Sedangkan ujung manfaat infrastruktur bagi masyarakat terutama adalah menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan asset dan kapabilitas.

Pendekatan infrastruktur sebagai wacana kritis menempatkan *spokeninteraction* dan *written text* tentang infrastruktur pada posisi utama. Dalam *spokeninteraction*

dan *written text* tentang infrastruktur terdapat pesan tentang peran infrastruktur bagi pembangunan masyarakat. Pesan tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk pernyataan atau teks yang mampu memberikan sugesti bahwa provisi dan utilisasi infrastruktur memiliki kontribusi signifikan bagi peningkatan asset dan kapabilitas. *Spoken interaction* dan *written text* tentang infrastruktur tidak berada dalam ruang *vacuum* (netral), maksudnya memiliki konteks tertentu. Konteks tersebut pada umumnya terkait dengan usaha meraih dukungan politik. Selanjutnya, *spoken interaction* dan *written text* memperoleh legitimasi dan dukungan sumber daya, terutama untuk meyakinkan public bahwa provisi dan utilisasi infrastruktur dilakukan serius. Legitimasi dan dukungan sumber daya tersebut selanjutnya menjadi sarana yang amat efektif untuk melakukan *bargaining power*.⁵

2. Infrastruktur sebagai produk

Hubungan infrastruktur dengan pembangunan masyarakat memiliki elemen-elemen yang beragam. Setiap elemen yang berbeda melahirkan sebuah pendekatan yang berbeda juga. Salah satunya adalah pendekatan infrastruktur sebagai produk. Pendekatan ini memberi tekanan kepada isu kapasitas infrastruktur. Adapun pendekatan ini meliputi

⁵Wodak, Ruth, 2001, "What CDA Is About? A Summary Of Its History, Important Concepts And Its Developments", dalam Ruth Wodak And Michael Mayer (Editors) *Methods Of Critical Discourse Analysis*, SAGE Publications Ltd, London 1-13

seputar teknologi yang digunakan, proses provisi dan utilisasi infrastruktur, dan pihak-pihak yang berperan dalam provisi dan utilisasi infrastruktur.

Pendekatan sebagai produk bermula dari jenis infrastruktur yang menjadi fokus analisis. Infrastruktur tersebut bisa dalam kategori pekerjaan umum atau bisa dalam fasilitas umum. Setiap infrastruktur yang dianalisis berdasarkan karakteristik tertentu dan diidentifikasi kapasitasnya. Pembangunan infrastruktur bisa menggunakan beberapa skema, yaitu skema *public-private partnership/PPP* (kerja sama pemerintah swasta), skema skema *public service obligation* (sebagai bagian tanggung jawab pemerintah), *corporate social responsibility/CSR* (sebagai tanggung jawab swasta), atau skema *community based infrastructure* (berbasis swadaya masyarakat). Infrastruktur ini asumsinya memiliki konteks tertentu sesuai kebutuhan, seperti penanganan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagainya

Pendekatan infrastruktur sebagai produk melibatkan analisis tentang penggunaan teknologi untuk provisi dan utilisasi infrastruktur (lihat *entry point*). Infrastruktur bisa dibangun dan dikembangkan menggunakan teknologi terapan dan teknologi canggih, bahkan teknologi *hybrid*. Semakin besar kapasitas infrastruktur, semakin canggih teknologi yang diperlukan. Proses Analisis terhadap provisi dan utilisasi infrastruktur dengan cara mengidentifikasi

tingkat kelayakannya. Identifikasi tentang kelayakan ketersediaan material, biaya, sumber daya, rancangan, teknologi, serta kesiapan masyarakat pembangunan infrastruktur. Analisis dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi seberapa jauh infrastruktur mampu mendukung program pembangunan masyarakat, akuntabilitas anggaran infrastruktur, proses konstruksi infrastruktur, monitoring dan evaluasi yang dikembangkan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi orang-orang yang berpartisipasi aktif dalam provisi dan utilisasi infrastruktur. Hasil analisis tentang teknologi, proses dan orang-orang diharapkan dapat diketahui tingkat relevansi, efisiensi, efektivitas dan sustainabilitas produk infrastruktur. Pendekatan ini terasa lebih mengedepankan domain teknik, namun tetap memperhatikan domain social, ekonomi dan lingkungan.

3. Infrastruktur sebagai fasilitas pendukung

Pendekatan infrastruktur sebagai fasilitas pendukung lebih fokus pada peran infrastruktur. Adapun elemen-elemen dalam pendekatan ini meliputi kegiatan provisi dan utilisasi infrastruktur kapasitas (personal, komunitas, dan sistem) serta jejaring dan logistik yang dikembangkan. Letak perbedaan infrastruktur sebagai produk dan infrastruktur sebagai agen perubahan berada pada posisi sentral sebuah infrastruktur, faktor utama yang menggerakkan perubahan. Sementara itu, pendekatan

infrastruktur sebagai fasilitas pendukung hanya sebagai salah satu di antara faktor-faktor yang menggerakkan perubahan.

Analisis yang dikembangkan dalam pendekatan infrastruktur sebagai fasilitas pendukung, pembangunan diawali dari mengidentifikasi masyarakat. Kebijakan dan program pembangunan ini bisa terkait sektor pertanian, perdagangan, industri, energi, telekomunikasi, permukiman, ketahanan pangan, pariwisata dan sebagainya. Analisis dalam pendekatan ini mulai dari mengidentifikasi provisi dan utilisasi infrastruktur yang diharapkan menjadi pendukung utama kebijakan atau program pembangunan. Infrastruktur bisa dalam kategori fasilitas umum atau bisa dalam kategori pekerjaan umum. Dalam konteks ini, infrastruktur diletakkan sebagai salah satu faktor di antara faktor-faktor yang memiliki peran penting dalam optimalisasi kebijakan dan program pembangunan. Faktor-faktor penting yang juga memiliki peran penting adalah kapasitas para pemangku kepentingan serta jejaring dan logistik.

Kapasitas dibagi dalam tiga kategori yaitu kapasitas personal, komunitas, dan system. Kapasitas personal terkait dengan keterampilan dan pengetahuan orang-orang yang menjadi sasaran kebijakan program pembangunan. Kebijakan dan program pembangunan dalam sector pertanian misalnya, kapasitas personal bukan hanya tercermin pada keterampilan petani dalam kegiatan budi

daya dan pengolahan pertanian, tetapi juga usaha mengintegrasikan pengetahuan local dan pengetahuan modern untuk memperoleh hasil produksi pertanian yang optimal. Sedangkan kapasitas komunitas tercermin pada kesediaan petani menjalin kerja sama, kesanggupan petani memberi input dan menerima kritik dari petani-petani lain, kesediaan melembagakan *trust*, serta kesediaan mengembangkan relasi-relasi social yang saling menguntungkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya kapasitas sistem tercermin pada pengembangan komunikasi, kerjasama dan koordinasi antara pihak yang bertanggung jawab pada implementasi kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Implementasi kebijakan dan program pembangunan membutuhkan jejaring dan logistik supaya kegiatan masyarakat menjadi lebih inovatif dan produktif. Jejaring berupa relasi-relasi sosial yang dikembangkan anggota masyarakat dengan pihak luar, termasuk dalam rangka memperoleh informasi, menjalin interaksi dan melakukan transaksi yang terkait dengan pengembangan usaha. Sedangkan logistik dibutuhkan untuk mengatur mata rantai penyediaan, penyimpanan dan distribusi barang atau material menjadi lebih efektif, efisien, merata dan tepat sasaran.

4. Infrastruktur sebagai agen perubahan

Pendekatan infrastruktur sebagai agen perubahan bertitik pada isu fungsi infrastruktur. Adapaun isi dari pendekatan ini meliputi dampak provisi dan utilisasi infrastruktur, respon dan adaptasi yang dilakukan terhadap perubahan akibat dampak provisi dan utilisasi infrastruktur, serta kendala dan peluang saat berjalannya perubahan itu. Dalam konteks ini, fungsi lebih menunjukkan manfaat sosial dan ekonomi yang masyarakat peroleh dari provisi dan utilisasi infrastruktur.

Analisis pendekatan infrastruktur sebagai agen diawali dari mengidentifikasi dampak provisi dan utilisasi infrastruktur, baik dampak langsung maupun bersifat tidak langsung. Setiap jenis infrastruktur memiliki jenis dampak yang berbeda-beda, karena itu analisis dampak infrastruktur menjadi amat beragam. Analisis tentang dampak infrastruktur telekomunikasi, memberi tekanan pembahasan di seputar arus informasi kehidupan masyarakat, analisis dampak infrastruktur transportasi berhubungan dengan mobilitas, dan analisis dampak infrastruktur irigasi terkait dengan pertumbuhan produk pertanian.

Analisis pendekatan infrastruktur sebagai agen perubahan juga membahas masalah respon dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan dari akibat provisi dan utilisasi infrastruktur. Respon masyarakat bisa bersedia menerima dan mendukung provisi dan utilisasi infrastruktur, tetapi bisa pula menolak pembangunan infrastruktur. Adaptasi masyarakat dalam konteks ini adalah kemauan dan

kemampuan masyarakat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Respon dan adaptasi masyarakat biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi proses tarik-ulur terkait manfaat social dan keuntungan ekonomi. Analisis tentang infrastruktur sebagai agen perubahan juga mengupas hal-hal terkait peluang dan kendala yang dihadapi masyarakat. Faktor-faktor lain yang juga memiliki kontribusi signifikan terhadap perubahan adalah kapasitas (personal, komunitas dan system), serta jejaring (*networking*) dan logistik.

C. Adaptasi Sosial

Adanya proses pembangunan meniscayakan terjadinya berbagai perubahan di sana sini. Akibatnya masyarakat harus berupaya untuk bisa menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang dibawa pembangunan tersebut. Pembangunan infrastruktur berupa jalan tol, misalnya, yang bukan tidak mungkin menerjang kawasan padat penduduk sehingga bisa jadi penduduk dalam kawasan itu harus “bedol deso” sehingga apa yang semula sudah kokoh, kemudian mengalami perubahan sehingga memerlukan adanya sebuah proses adaptasi.

Konsep adaptasi ditujukan pada cara-cara penyesuaian hidup sebuah organisme atau sekelompok orang terhadap lingkungannya. Penyesuaian ini dilakukan organisme untuk menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya sehingga mereka harus mampu keluar dari tekanan tersebut untuk kemudian bertahan hidup di dalam lingkungannya.

Untuk dapat bertahan hidup seorang individu atau kelompok orang harus mampu menanggulangi kesulitan-kesulitan yang dialaminya terutama yang berasal dari lingkungan alam dan lingkungan sosialnya. Dalam tahapan ini individu harus mampu untuk: bertahan hidup sebagai resisten terhadap musuh alaminya; memperoleh sumber daya pemenuhan kebutuhan primernya yaitu makanan, air dan udara; memperoleh air, udara dan makanan; membentuk keluarga dan keturunan; serta siap menghadapi segala perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya. Keseluruhan proses pertahanan diri ini disebut sebagai proses adaptasi.

Konsep adaptasi menurut Bennett⁶ berkembang dari adanya teori evolusi yang berisi tentang berkembangnya manusia secara biologis dan fisik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam maupun lingkungan budayanya. Konsep adaptasi menurut Bennett terbagi menjadi tiga yaitu ada adaptasi tingkah laku yaitu suatu tindakan atau tingkah laku dengan mempertimbangkan baik buruknya hasil yang akan didapat, lalu ada adaptasi strategi yang merupakan suatu proses atau cara di mana manusia merespon pertimbangan yang sudah dipilih dan memikirkan cara lain agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak menimbulkan masalah dengan pihak lain, dan yang terakhir adaptasi proses yaitu perubahan-perubahan yang muncul dengan menyesuaikan strategi yang sudah dipilih dan ditunjukkan dalam waktu yang panjang. Menurut Bennett

⁶John W. Bennett, *The Ecological Transition: Cultural Anthropology and Human Action*, New York: Pargamoen Press, Inc., 1976

dalam memandang ekologi faktor-faktor yang ada di lingkungan baik eksternal maupun internal harus diidentifikasi mana hal-hal yang dianggap penting, mana yang jadi penghambat, dan mana yang bisa dikembangkan pada tingkah laku manusia. Konsep ini mengasumsikan bahwa organisasi sosial budaya merupakan hasil dari proses adaptasi manusia dalam mengantisipasi masalah yang akan datang. Bennett mengemukakan bahwa: “Basis ekologi manusia adalah kapasitas manusia untuk melakukan self objectification, belajar, dan mengantisipasi. Manusia mengkonseptualkan diri mereka sendiri agar dapat bertindak terhadap lingkungan mereka.” Berdasarkan konsep yang dikemukakan Bannet, Ahimsa Putra dalam Saharuddin menyatakan bahwa adaptasi merujuk pada adanya sebuah proses penyesuaian terhadap suatu kondisi yang berubah. Adaptasi merupakan proses perubahan yang terjadi pada diri individu maupun individu dengan lingkungannya, yang memerlukan waktu yang cukup lama serta harus melalui serentetan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang.⁷

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan untuk menganalisa hasil penelitian ini dibutuhkan konsep adaptasi lingkungan sebagai upaya masyarakat terdampak mengembangkan strategi-strategi adaptif sebagai bentuk penyesuaian dirinya terhadap perubahan lingkungan yang tentunya juga berimbas pada perubahan sosial dan ekonomi mereka di wilayah perbaikan kembali.

⁷Baca: Saharudin, “Antropologi Ekologi” dalam Adwibowo Soeryo (Ed), *Ekologi Manusia*, Bogor: Fakultas Ekologi MANusia IPB, 2007, hlm. 46-47.

Adaptasi sosial merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri dalam lingkungan sosial. Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan. Penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, jadi dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan pribadi.⁸

Menurut Gianpiero ada tiga macam adaptasi: fungsional, epi/genetik dan budaya. Adaptasi fungsional adalah adaptasi yang melibatkan perubahan dalam fungsi sistem organ, morfologi, komposisi biokimia, anatomi, dan komposisi tubuh manusia. Adaptasi epi genetik adalah adaptasi yang merujuk pada karakteristik turunan tertentu yang mempunyai toleransi dan survival baik secara individu maupun populasi. Sedangkan adaptasi budaya adalah adaptasi nonbiologis dalam tingkah laku, sosial serta peralatan yang merupakan respon non biologis manusia untuk bertahan hidup. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang hidup dengan berbagai budaya yang mereka ciptakan berdasarkan pemikiran mereka.

Dalam proses kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, individu tidak dapat begitu saja untuk melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan dirinya, karena individu tersebut mempunyai lingkungan diluar dirinya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Dan lingkungan ini mempunyai aturan dan norma-norma yang membatasi tingkah laku individu tersebut.

⁸W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung, PT Eresco, 1991, hlm.55.

Penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial disebut dengan *adjustment*. Adaptasi lebih bersifat fisik, dimana orang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, karena hal ini lebih banyak berhubungan dengan diri orang tersebut. tingkah lakunya tidak saja harus menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan lingkungan sosialnya (*adjustment*). Soerjono Soekanto⁹ memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi sosial, yaitu:

- a. Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan.
- b. Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan.
- c. Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah.
- d. Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan.
- e. Memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan.
- f. Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah.

Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian. Penyesuaian dari individu, kelompok maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun suatu kondisi yang diciptakan.

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 2009

Laju pembangunan yang berupa pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak serius terhadap masyarakat yang kena dampaknya, terutama sektor sosial ekonomi. Hilangnya mata pencaharian sebagai petani, misalnya, mengharuskan masyarakat yang berprofesi sebagai petani melakukan berbagai strategi adaptasi sosial ekonomi untuk bisa melanjutkan kehidupannya.

Itu sebabnya, dalam rangka penyesuaian karena adanya berbagai perubahan diperlukan adanya strategi-strategi agar proses penyesuaian tersebut bisa berjalan efisien dan efektif. Strategi adaptasi atau *Coping Strategies* dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah hidup yakni dengan memanfaatkan kemampuan segenap anggota keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.¹⁰ Sedangkan Scones¹¹ mengatakan bahwa, “strategi adaptasi merupakan suatu kombinasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara-cara memanfaatkan berbagai aset, pilihan aset untuk investasi serta bagaimana rumah tangga mempertahankan aset dan pendapatannya.” Ada beberapa strategi adaptasi yang bisa

¹⁰E. Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009

¹¹ Scones, *Sustainable Rural Livelihoods, a Framework for Analysis*. IDS working Paper 72. Institute of Development Studies, 2001

diterapkan oleh berbagai masyarakat akibat dari adanya proses pembangunan infrastruktur.¹²

1. Strategi Adaptasi dengan Tujuan Menambah Pendapatan

Hilangnya lahan garapan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani, mengharuskan mereka mencari strategi alternative lain sebagai upaya dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat petani yang terkena dampak pembangunan sangat beragam. Tindakan pertama yaitu masih mempertahankan profesi sebagai petani. Hal itu dilakukan oleh masyarakat petani yang memiliki lahan garapan pengganti, baik lahan garapan di daerah lain ataupun lahan garapan baru yang berada di sekitar pinggiran.

Pendapatan yang tidak menentu dan terbilang kecil, dari pekerjaan mereka saat ini. Masyarakat petani melakukan strategi lain untuk menambah pendapatan keluarga. Hal itu dilakukan dengan mendorong istri atau anak untuk ikut bekerja mencari nafkah. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri masyarakat petani diantaranya yaitu membuka warung kecil-kecilan dengan menjual sayuran dan makanan ringan di depan rumahnya, memproduksi opak,

¹²Baca: Risa Nopianti, Triesya Melinda, Junardi Harahap “Strategi Adaptasi Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Di Dusun Cipondoh Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang” dalam Patanjala Vol. 10 No. 1 Maret 2018: 17-34

membantu menanam sayuran, ubi- ubian, serta buah-buahan untuk dijual. Tidak hanya istri peran anak yang sudah mampu bekerjapun menjadi suatu strategi untuk bisa menstabilkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak masyarakat petani diantaranya yaitu ikut bekerja menjadi buruh tani, bekerja sebagai nelayan ikan, bekerja di pertokoan, dan ikut bekerja menjadi buruh bangunan.

2. Strategi Adaptasi bertujuan Mengurangi Biaya Pengeluaran

Agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan. Masyarakat petani yang terkena dampak melakukan strategi penghematan. Strategi penghematan yang dilakukan yaitu dengan membeli bahan makanan seadanya serta mengolah bahan makanan dari hasil kebun. Hal itu dilakukan agar biaya yang dikeluarkan untuk makan tidak terlalu banyak. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi terbilang sederhana, seperti sayuran, tahu, tempe, serta Ikan yang di dapat dari Waduk sebagai bahan makanan sehari-hari. Sedangkan, pengeluaran biaya non- makanan lebih kepada tidak membeli barang-barang elektronik maupun pakaian baru. Selain itu juga, lebih memanfaatkan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak dibandingkan gas elpiji.

3. Strategi Adaptasi dengan Tujuan Memanfaatkan Akses Sosial

Mekipun masyarakat yang terkena dampak sudah melakukan berbagai macam strategi. Namun, kenyataannya strategi tersebut terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendesak. Oleh karena itu, masyarakat memanfaatkan akses jaringan sosial. Pemanfaatan akses jaringan sosial biasanya dilakukan masyarakat ketika sedang membutuhkan keperluan yang bersifat mendesak. Akses jaringan sosial formal yang dimanfaatkan yaitu berupa bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut yaitu berupa dana pinjaman yang bersumber dari PNPM Desa, serta Beras Raskin yang biasa didapatkan oleh masyarakat yang tergolong miskin. Sedangkan, Akses jaringan sosial lainnya yaitu berupa akses jaringan informal. Akses jaringan informal merupakan akses jaringan dengan cara meminjam uang ke kerabat terdekat atau mengutang ke warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

4. Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Aktif

Strategi adaptasi sosial ekonomi aktif merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk menambah pendapatan keluarga, dengan cara melakukan berbagai macam tindakan. Strategi untuk memperoleh pendapatan yang dilakukan masyarakat, dilakukan dengan berbagai tindakan diantaranya yaitu tetap mempertahankan mata pencaharian sebagai petani, beralih mata pencaharian, melakukan migrasi sikuler, serta mendorong istri dan anak untuk ikut mencari nafkah. Aset modal yang digunakan masyarakat

petani dalam melakukan strategi aktif diantaranya adalah (1) Aset produktif berupa Lahan pertanian, peralatan mencari ikan, peralatan memproduksi opak, peralatan bangunan, serta kendaraan motor. (2) Aset modal manusia berupa keterampilan dan kondisi kesehatan yang baik. (3) Aset tenaga kerja yaitu anggota keluarga yang dapat ikut mencari nafkah, seperti istri dan anak. Pengelolaan aset modal yang dimiliki tersebut dikaji berdasarkan kerangka analisis Moser yang disebut *The Aset Vulnerability Framework* yang berbagai pengelolaan asset yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian atau pengembangan strategi tertentu dalam mempertahankan kelangsungan hidup.

5. Melakukan Pndah Mata pencaharian dan Diversifikasi Pekerjaan

Peralihan mata pencaharian merupakan suatu reaksi masyarakat dalam menghadapi perubahan dengan tujuan untuk mencapai penghidupan yang berkelanjutan. Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi sebuah infrastruktur mengakibatkan adanya perubahan lingkungan, social, dan ekonomi, Beraliihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian menimbulkan masalah bagi petani kecil, dikarenakan mereka tidak memiliki keahlian lain di luar bidang pertanian. Sehingga, pekerjaan yang mereka lakukan adalah menjadi buruh bangunan, bahkan ada yang menjadi pengangguran.” Penghasilan yang tidak menentu baik dari pekerjaan menjadi petani, nelayan, tukang ojeg dan buruh

bangunan membuat sebagian dari mereka melakukan diversifikasi (menambah pendapatan) dari pekerjaan lain.

Diversifikasi yang dilakukan cukup beragam diantaranya yaitu dengan menanam sayuran, ubi- ubian atau buah-buahan di sekitar pekarangan rumah atau tanah milik pemerintah, dimana hasil dari tanaman tersebut di jual. Keterlibatan istri untuk ikut membantu mencari nafkah dikarenakan kondisi pendapatan suami yang rendah, sehingga istri memiliki peran penting dalam menopang kehidupan sosial ekonomi keluarga.

Tidak hanya istri peran anak yang sudah mampu bekerjapun menjadi suatu strategi untuk bisa menstabilkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak petani diantaranya yaitu ikut bekerja menjadi buruh tani, bekerja sebagai nelayan ikan di Waduk Jatigede, bekerja di pertokoan, dan ikut bekerja menjadi buruh bangunan.

6.Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Pasif

Masyarakat melakukan strategi pengurangan biaya pengeluaran, agar pendapatan yang diperoleh dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Strategi ini juga merupakan strategi yang digunakan oleh masyarakat miskin untuk bisa bertahan hidup, dengan cara meminimalisir pengeluaran uang. Tindakan yang dilakukan pertama yaitu terkonsentrasikan pada pengurangan biaya makan. Strategi penghematan tersebut dilakukan dengan cara membeli

bahan makanan seadanya serta mengolah bahan makanan dari hasil kebun. Sehingga, biaya makan yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Lauk pauk yang biasa dikonsumsi yaitu seperti sayuran, tahu, tempe, serta Ikan yang dapat sebagai bahan makanan sehari-hari. yang menunjukkan bahwa, strategi yang dilakukan oleh keluarga sebagai dampak dari penurunan pendapatan adalah dengan mengurangi konsumsi daging dan ikan. Sedangkan, ada peningkatan konsumsi makanan dengan bahan baku kedelai, seperti tahu dan tempe. Pengeluaran biaya non- makanan juga, dilakukan oleh masyarakat, dengan cara mengurangi pembelian barang- barang elektronik maupun pakaian baru. Pengurangan nonmakanan juga dilakukan dengan mengurangi biaya pendidikan.

Tindakan ini dilakukan dengan alasan biaya pendidikan yang tidak bisa terpenuhi oleh pendapatan saat ini. Sehingga, pengurangan biaya pendidikan dilakukan dengan mendorong anak untuk ikut bekerja mencari pendapatan bagi keluarga. Sehingga, strategi pasif merupakan suatu strategi dengan cara mengurangi biaya pengeluaran keluarga, baik itu biaya sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya.

6. Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Jaringan Sosial

Strategi jaringan sosial yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan akses sosial baik formal maupun informal. Strategi jaringan merupakan

strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara menjalin relasi, baik formal maupun dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan. Meskipun masyarakat petani yang terkena dampak sudah melakukan berbagai macam strategi. Namun, kenyataannya strategi tersebut terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat mendesak. Akses jaringan formal yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan dengan cara memanfaatkan dana PNPM desa untuk dijadikan sebagai modal dalam melakukan usaha, serta memanfaatkan program kemiskinan berupa pemanfaatan raskin. Sedangkan, akses jaringan informal dilakukan dengan meminjam uang ke tetangga/kerabat dan mengutang ke warung untuk memudahkan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang bersifat mendadak. Fungsi jaringan sosial adalah untuk memudahkan masyarakat memperoleh jalan alternatif ke sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungannya. Jaringan sosial dapat dibentuk berdasarkan basis kerabat, tetangga, pertemanan, atau campuran dari unsur-unsur tersebut. Jaringan sosial ini terbentuk akibat adanya interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan dapat membantu keluarga miskin ketika membutuhkan uang secara mendesak.

Tindakan strategi adaptasi sosial ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, memiliki korelasi dengan teori structural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parson. Hal itu dikarenakan, masyarakat merupakan suatu sistem sosial dengan

subsistem- subsistem yang saling berkaitan dan berhubungan. Subsistem-subsistem yang ada di dalam masyarakat mengalami perubahan diakibatkan oleh pembangunan. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, ditujukan untuk mencapai keadaan seimbang dan teratur. Masyarakat akan senantiasa berusaha untuk menstabilkan keadaan yang berubah. Salah satunya adalah mengstabilkan kebutuhan dalam bidang sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam mempertahankan elemen tersebut agar tetap stabil, maka masyarakat melakukan empat prasyarat mutlak diantaranya yaitu adaptasi, *goal attainment*, integrasi dan latency.¹³ (Ritzer,G, dan Gouglas, J, 2011). Adaptasi (*adaptation*) dilakukan oleh petani dengan cara melakukan penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan dan sumber daya yang berubah. Penyesuaian dilakukan dengan berbagai cara dan strategi baik aktif, pasif dan jaringan sosial. Tujuan dari strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak lain adalah untuk memenuhi tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan agar mendapatkan kehidupan yang tetap stabil meskipun kondisi yang di alami mereka saat ini berbeda dengan keadaan sebelumnya. Integrasi (*integration*) mengacu kepada pemeliharaan subsistem dalam keluarga petani. Keluarga merupakan suatu system sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan lainnya. Integrasi dalam masyarakat melibatkan ketiga

¹³G. Ritzer dan J. Douglas, Teori Sosilologi Modern , Jakarta, Prenada Media Group, 2011,

komponen lainnya. Integrasi merupakan hal yang penting agar semua keluarga mampu bekerja sama dan saling membangun dalam melakukan strategi adaptasi sosial ekonomi. Hal itu dapat terlihat dari hasil temuan penelitian, dimana dalam mencapai tujuan dalam menstabilkan kondisi sosial ekonomi, setiap anggota keluarga baik istri ataupun anak ikut membantu dalam menstabilkan kondisi sosial ekonomi. Pemeliharaan strategi-strategi yang dilakukan oleh masyarakat dipelihara dan diperbaharui sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah.

BAB III

PEMBANGUNAN JALAN TOL DAN DAMPAKNYA BAGI LEMBAGA KEAGAMAAN DI KOTA SEMARANG

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan demikian ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Agar pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan, maka dalam pelaksanaannya harus diletakkan dalam beberapa prinsip. Pertama, manusia Indonesia adalah subyek dan obyek pembangunan sekaligus. Oleh karenanya pembangunan harus diletakkan dan mempunyai kepribadian Indonesia, bukan justru menggunakan identitas negara lain. Kedua, ada keselarasan, keserasian, kesimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh aspek kegiatan pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini, unsur manusia, unsur

sosial-budaya, dan unsur lainnya harus mendapatkan perhatian yang seimbang. Ketiga, Hasil yang diraih oleh pembangunan harus bisa dirasakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air. Pembangunan tidak boleh terlaksana secara terpusat sehingga yang menikmati hanya sebagian saja. Keempat, Keterlibatan seluruh komponen yang ada dalam Negara. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah mesti saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan percepatan ekonomi nasional, salah satunya melalui pembangunan. Pembangunan nasional yang merata dan berlandaskan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam ayat lima, dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pembangunan dan pemerataan di seluruh Indonesia, diupayakan oleh negara dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa, terutama persoalan infrastruktur sebagai sarana percepatan pembangunan dan ekonomi negara menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian, negara selalu berusaha mewujudkan cita-cita tersebut dengan semakin gencar

melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di pulau Jawa, melainkan menjangkau seluruh kawasan Terluar, Terdalam, dan Tertinggal (3T). Gencarnya pembangunan nasional memang menjadi fokus program kerja presiden dan seluruh jajarannya dari periode ke periode, terutama saat ini pembangunan infrastruktur secara masif terlihat pada pemerintahan presiden Joko Widodo-Jusuf Kala.

Pemerintah dengan segala upaya melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur negara, terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, sebagai bukti target pembangunan nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut, ada sepuluh komponen pembangunan strategis yang berusaha diwujudkan oleh pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur jalan tol, infrastruktur jalan nasional atau strategis nasional non-tol, pembangunan infrastruktur sarana dan pra-sarana kereta api antar kota, infrastruktur kereta api dalam kota, revitalisasi bandar udara, bandar udara baru, bandar udara strategis lainnya, pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, program satu juta rumah, pembangunan kilang minyak, pembangunan pipa gas atai minyak LPG, infrastruktur energi asal sampah, penyediaan infrastruktur air minum, pembangunan tanggul penahan banjir, pembangunan bendungan dan beberapa infrasturtur pendukung lainnya.

Dari sekian banyak program pembangunan strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintahan era Joko Widodo-Jusuf Kalla tersebut di atas, peneliti akan membatasi dengan pembahasan pada pembangunan jalan tol yang sempat menjadi kajian dan perbincangan dalam masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, bahwa dalam rangka percepatan perwujudan pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara financial, Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.

Pembangunan jalan tol dilakukan di beberapa provinsi besar di Indonesia sebagai upaya untuk kemudahan mobilisasi perekonomian yang diharapkan nantinya agar berimbas pada percepatan ekonomi nasional. Di satu sisi, pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah juga berimbas pada masyarakat dan aspek pertanian, karena pembangunan jalan tol telah memakan lahan masyarakat yang tidak sedikit. Penggusuran sekian banyak lahan, bangunan, rumah, dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai konsekuensi logis diberlakukannya Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan mewujudkan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam persoalan ini, menarik membahas dampak pembangunan jalan tol Batang-Semarang yang tak sedikit menyebabkan persoalan sengketa pembebasan lahan yang terjadi, seperti halnya kasus di Kabupaten Kendal, yang sampai berdampak pada banyaknya warga Kendal yang harus mengungsi di kompleks DPRD Kabupaten Kendal. Dari hal tersebut, yang menarik dan perlu dikaji secara mendalam adalah pengusuran lembaga-lembaga keagamaan yang terjadi sebagai akibat pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Oleh karena persoalan di atas, peneliti akan meneliti beberapa lembaga keagamaan di kota Semarang yang terkena dampak pembangunan jalan tol sebagai bagian dari kebijakan nasional yang tidak bisa terhindarkan.

A. Pembangunan Jalan Tol di Kota Semarang

Kota Semarang adalah jantung dari Propinsi Jawa Tengah karena menjadi ibukota propinsi. Posisi sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah menjadikannya sebagai satu-satunya kota di Propinsi Jawa Tengah yang dapat

digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibukota propinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Propinsi Jawa Tengah. Namun demikian, tentu saja kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak dapat terlepas dari dukungan daerah-daerah di sekitarnya seperti Ungaran, Demak, Salatiga, Kudus dan Kendal.

Sebagai kota metropolitan yang menjadi ibukota propinsi, Semarang memiliki sejarah yang panjang. Mulanya dari dataran lumpur, yang kemudian hari berkembang pesat menjadi lingkungan maju dan menampakkan diri sebagai kota yang penting. Sebagai kota besar, ia menyerap banyak pendatang. Mereka ini, kemudian mencari penghidupan dan menetap di Kota Semarang sampai akhir hayatnya. Lalu susul menyusul kehidupan generasi berikutnya sehingga yang semula budaya masyarakatnya adalah masyarakat rural berubah menjadi masyarakat urban.

Sebagai masyarakat yang bersifat urban, maka kota ini menampung berbagai budaya yang sangat kompliked. Ada berbagai budaya yang bagi masyarakat rural atau masyarakat tradisional dinilai tabu, seperti para perempuan yang bekerja malam hari bahkan samapi dini hari, menjadi bagian dari kehidupan yang biasa saja. Ada juga berbagai budaya yang terasa bertentangan dengan nilai-nilai etika dan agama. Akan tetapi ini adalah kenyataan yang tidak bisa dinafikan

Dengan demikian, Kota Semarang menjadi sebuah kota yang mempunyai peradaban yang paling maju dan mempunyai persoalan yang paling rumit di Jawa Tengah. Ia menjelma menjadi barometer keberhasilan di Jawa Tengah.

Secara geografis wilayah Kota Semarang berada di antara 6°50'-7°10' LS dan 109°35'- 110°50' BT dengan luas wilayah 373,70 km² yang terdiri dari 16 kecamatan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- Batas Utara : Laut Jawa
- Batas Selatan : Kabupaten Semarang
- Batas Timur : Kabupaten Demak
- Batas Barat : Kabupaten Kendal

Sebagai kota utama yang ada di Jawa Tengah, maka bisa dipastikan tingkat mobilitas penduduknya sangat tinggi. Mobilitas ini bukan semata yang berada dalam kota, melainkan juga dalam arus dari dan ke Semarang. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur yang berupa jalan juga harus mendapatkan perhatian serius. Demikian pula dengan pembangunan jalan tol.

Pembangunan jalan to merupakan salah satu bentuk penyediaan sarana-prasarana transportasi public. Ia menjadi salah satu prioritas utama Program Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Karena kapasitas jalan tol terutama di pulau Jawa, tidak sebanding dengan perkembangan jumlah dan mobilitas penduduk. Keberadaan jalan tol baru tersebut diharapkan juga mampu bersinergi dengan jalan arteri, jalan

konektor, yang sudah ada atau akan dikembangkan, sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan jalan Tol Semarang-Batang.

Jalan Tol Batang-Semarang adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 75 kilometer yang menghubungkan daerah Batang dengan Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Jalan tol ini merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

Pembangunan jalan tol ini terbagi menjadi 5 seksi, meliputi :

- Seksi I, awal proyek - Batang Timur (3,2 km)
- Seksi II, Batang Timur - Weleri (36,35 km)
- Seksi III, Weleri - Kendal (11,05 km)
- Seksi IV, Kendal - Kaliwungu (13,5 km)
- Seksi V, Kaliwungu - Krapyak (10,9 km)

Jalan tol Semarang-Batang merupakan bagian jaringan jalan tol Trans Jawa yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah menyadari, bahwa pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan daya saing bangsa demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu di masa mendatang Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi sehingga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan

jalan tol, khususnya terkait proses pembebasan lahan dan penyelesaian pembangunannya.

Pada hakekatnya, jika Pemerintah memerlukan tanah untuk pelaksanaan pembangunan harus diusahakan agar tanah tersebut diperoleh dengan persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Akan tetapi cara yang demikian tidak selalu dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan, karena ada kemungkinan pemegang hak atas tanah tersebut tidak bersedia melepaskan haknya ataupun jika mau melepaskan haknya, pemegang hak atas tanah dimaksud meminta ganti rugi atau harga atas tanah tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Dalam hal ini sering disebut sebagai ganti untung, bukan ganti rugi karena sebagian anggota masyarakat memperoleh ganti untung yang demikian tinggi jika dibanding dengan anggota masyarakat lain, bahkan jika dibanding dengan harga normalnya.

Salah satu problem rumit yang selalu mengemuka dalam kaitannya dengan pembangunan proyek jalan tol adalah masalah pembebasan tanah karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas, oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah dikuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak milik lainnya.

Sebenarnya penggusuran terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang, dan juga terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Penggusuran biasanya terjadi dalam skala besar, dimana sejumlah besar masyarakat dipaksa untuk pindah dari rumah tempat tinggalnya. Penggusuran juga biasanya ditujukan kepada orang miskin, penghuni liar atau pemukiman liar. Akibat yang terjadi terhadap korban penggusuran adalah sebuah bencana atau suatu korban pembangunan, mereka tidak memiliki tempat tinggal dan bahkan menjadi lebih miskin lagi. Dalam beberapa kasus, korban penggusuran bahkan tidak mendapatkan kompensasi maupun perumahan alternatif karena menempati tanah yang bukan haknya seperti di bantaran sungai dan atau menempati tanah milik Negara.

Namun tidak demikian dengan korban pembangunan jalan tol Semarang-Batang, sebab semua korban penggusuran menempati tanah hak milik pribadi, lembaga, tanah wakaf atau yayasan. Beberapa di antaranya adalah tanah dan bangunan milik pribadi, baik yang tinggal di perumahan maupun non perumahan. Demikian pula, hak milik yang ada pada berbagai lembaga keagamaan seperti musholla, masjid, madrasah diniyah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya, baik Taman Kanak-Kanak Islam, Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Diniyah (Madin), bahkan milik negara seperti SMPN 16, Kota, Kota Semarang.

Artinya, ada cukup banyak lembaga keagamaan yang terkena penggusuran akibat dibangunnya jalan tol ini.

Bertitik tolak dari penggusuran ini tentu menyangkut agama sebagai fenomena sosial pada komunitas Muslim, baik pada siswa, orang tua siswa atau wali murid, para guru, pengurus yayasan, jamaah dan takmir musholla atau masjid, kelompok-kelompok pengajian, serta masyarakat Islam sekitar pada umumnya. Keberadaan berbagai lembaga keagamaan tersebut pada umumnya telah sedemikian mapan. Sehingga ketika lembaga-lembaga tersebut mengalami penggusuran, maka berbagai persoalan akan timbul. Sebagai konsekuensinya, mereka semua perlu adaptasi sosial, baik mereka yang meninggalkan komunitasnya pada khususnya maupun komunitas yang ditinggalkannya pada umumnya.

Pembangunan yang diperuntukan bagi kepentingan umum dewasa ini menuntut adanya pemenuhan kebutuhan akan pengadaan tanah secara cepat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); disusul Perpres No. 148 Tahun 2015 menjadi salah satu payung hukum bagi pemerintah dalam hal mempermudah penyediaan tanah untuk pembangunan proyek tol tersebut. Melalui kebijakan tersebut, dalam hal mekanisme pencabutan hak atas

tanah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil tanah milik masyarakat yang secara kebetulan diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pernyataan ini dimaksudkan bahwa secara konstitusional Negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan tanah oleh Negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, kuat dan hak penuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut.

Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan kewenangan dan tanggung jawab. Dinamika pembangunan nasional, seringkali menuntut Negara untuk melakukan penataan kembali atas tata ruang termasuk pemanfaatan tanah sedemikian rupa yang meminta masyarakat untuk menyerahkan tanahnya kepada Negara untuk dipergunakan bagi kepentingan umum. Pembangunan prasarana jalan raya, MRT, jalan

layang, jalan tol, kawasan industri, pertanian dan sebagainya adalah beberapa di antara dasar legitimasi yang digunakan oleh Negara dalam pengambil-alihan tanah masyarakat. Mekanisme musyawarah yang seharusnya menjadi sarana untuk mencari jalan tengah dalam menentukan besarnya ganti kerugian seringkali tidak mencapai kata sepakat dan karenanya dengan alasan kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dapat menentukan secara sepihak besarnya ganti rugi dan kemudian menitipkannya ke pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi. Dalam hal ini, memang ada beberapa individu yang belum dapat menerima ganti rugi yang diberikan oleh pihak pengembang karena diperkirakan ganti ruginya masih terlalu rendah dengan situasi, kondisi, tanah, bangunan, dan fasilitas yang dimiliki.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa ada fenomena hubungan antara agama dan adaptasi sosial dalam mengatasi penggusuran untuk pembangunan jalan tol, karena fakta sosial menunjukkan adanya peran tingkah laku agama, terutama dalam lembaga sosial-keagamaan dan adaptasi sosialnya untuk mengatasi masalah penggusuran sebagai korban pembangunan jalan tol Semarang-Batang, baik yang berhubungan dengan komunitas sosial Musholla, Masjid, dan madrasah, serta lembaga pendidikan Islam lainnya.

B. Profil Lembaga Keagamaan di Kota Semarang

Sebagai sebuah kota dengan peradaban yang maju dan berkarakter urban, Kota Semarang menjadi kota terbuka yang menampung berbagai kecenderungan. Hal ini tercermin dari keberadaan berbagai organisasi yang hidup dan berkembang di Kota Semarang. Mulai dari organisasi yang bercorak fundamental sampai organisasi yang bercorak liberal tumbuh dan berkembang secara baik di Kota Semarang, kendati pun jika dibandingkan dengan berbagai kota besar lainnya di Indonesia, tingkat keriuhan sosial budayanya masih kalah.

Berbagai lembaga keagamaan Islam pun berkembang secara baik di Kota Semarang.

1. Masjid Baitul Mustaghfirin, Beringin

Masjid Baitul Mustaghfirin adalah masjid pertama dan satu-satunya yang terletak di Beringin Kulon, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Masjid tersebut digunakan masyarakat sekitar sebagai tempat beribadah sehari-harinya. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid Baitul Mustaghfirin menjadi sarana dan tempat

berdakwah para kyai sekitar dalam menyebarkan syiar agama Islam sejak tahun 70-an.¹

Sejarah berdirinya masjid Baitul Mustaghfirin dimulai pada tahun 1970-an. Dengan keinginan kuat para kyai sekitar Beringin Kulon untuk menyebarkan syiar agama Islam, maka dibangunlah sebuah *Langgar* atau mushola yang terbuat dari kayu di atas tanah wakaf.,² untuk tempat beribadah warga dan penyebaran agama Islam di daerah tersebut. Mulailah, pada tahun 1980-an, mushola yang ada tersebut dibangun kembali dan dialihfungsikan menjadi masjid induk yang ada di Beringin *Kulon* dengan ukuran 9x9 meter.

Upaya renovasi dan pelebaran serambi masjid dilakukan pihak pengurus masjid pada tahun 1986, dengan tujuan untuk memperluas masjid agar mampu menampung lebih banyak warga, yang akhirnya bangunan tersebut bertahan sampai sekarang. Dalam proses pendirian masjid Baitul Mustaghfirin, melibatkan beberapa tokoh-tokoh agama saat itu dan semuanya telah wafat. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Kyai Nawi, Kyai Kemad, KH. Rogison, KH. Bakri dan KH. Surur. Mereka

¹ Wawancara dilakukan dengan Qosim, salah seorang pengurus Masjid Baitul Mustaghfirin pada tanggal 26 Juni 2018

² Wawancara dilakukan dengan Nahrowi, salah seorang pengurus Masjid Baitul Mustaghfirin pada tanggal 23 September 2018.

semua adalah tokoh-tokoh agama yang menurut beberapa masyarakat dan pengurus takmir masjid tersebut adalah sosok yang berpengaruh dalam pembangunan masjid Baitul Mustaghfirin yang menjadi masjid satu-satunya di Beringin Kulon saat ini.



Gambar 1: Suasana Shalat Id 1439 H/2018 M di Masjid Baitul Mustaghfirin

Sebagaimana masjid-masjid yang lain, Masjid Baitul Mustaghfirin juga dilengkapi dengan struktur kepengurusan masjid. Hanya saja, ketika laporan ini dibuat masjid Baitul Mustaghfirin belum menetapkan secara definitif kepengurusannya karena masih menanti masjid yang baru yang menggantikan masjid lama sebagai akibat adanya pembangunan jalan tol belum jadi. Adapun susunan sementara untuk masa transisi adalah

Ketua : Afif Efendi, S.Pd. I
Sekretaris : Ruswanto
Bendahara : H. Nahrowi

Tak jauh berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya, masjid Baitul Mustaghfirin juga memiliki banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan, hal tersebut menurut penuturan salah satu pengurus takmir bahwa kegiatan keagamaan dalam syiar agama Islam berjalan dengan baik dan lancar seperti biasanya sebelum dan sesudah terjadinya pembangunan dan penggusuran beberapa pemukiman di sekitar masjid. Masjid Baitul Mustaghfirin merupakan salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh ditengah pembangunan jalan tol yang sedang berjalan. Mengapa demikian? Karena telah ada perjanjian antara takmir dan pihak tol bahwa masjid lama tidak boleh dibongkar terlebih dahulu sebelum bangunan masjid baru yang sedang dibangun sudah selesai mencapai 100%. Oleh karenanya, kegiatan-kegiatan keagamaan masih berjalan dengan baik, walaupun posisi masjid berada di dalam kawasan proyek pembangunan jalan tol, namun kegiatan-kegiatan masih berjalan seperti: kegiatan shalat

berjamaah, kegiatan dziba'an, kegiatan tahlilan setiap malam Jumat dan beberapa kegiatan keagamaan lainnya. Pihak pengurus takmir masjid Baitul Mustaghfirin juga menjelaskan bahwa proses kegiatan keagamaan yang diadakan oleh masjid berjalan lancar dan antusias warga juga seperti biasanya.

Dampak yang dihadapi dari kebijakan nasional pembangunan jalan tol Batang-Semarang mengakibatkan beberapa lembaga keagamaan tergusur dan direlokasi. Dalam menyikapi pengusuran, pengurus takmir masjid Baitul Mustaghfirin melakukan berbagai upaya, pertama, melakukan negosiasi secara intensif agar bangunan masjid tidak dibongkar terlebih dahulu sebelum bangunan masjid baru jadi 100%, kedua, melakukan negosiasi yang diharapkan tidak ada yang dirugikan dan dikorbankan terutama masyarakat sekitar sebagai jamaah masjid Baitul Mustaghfirin. Ketiga, melakukan negosiasi agar mendapatkan ganti bangunan yang jelas tempat dan fisiknya, baru setelah itu, masjid lama yang masih berdiri bisa dirobohkan.

Upaya pencarian jalan keluar dilakukan oleh pengurus takmir dengan melakukan diskusi dan komunikasi terus menerus agar keinginan mereka bisa terpenuhi, disatu sisi keinginan pemerintah dalam membangun infrastruktur nasional juga

teralisasi. Usaha mendapatkan lahan dan bangunan terlebih dahulu sebelum masjid dibangun menjadi prioritas yang selalu diusahakan pengurus takmir, masjid tidak boleh dibongkar sebelum mereka mendapatkan lahan dan bangunan baru sebagai pengganti masjid yang lama. Usaha-usaha memberikan rekomendasi tanah lokasi pembangunan masjid baru selalu diberikan pihak pengurus sebagai upaya percepatan pembangunan dan relokasi, agar nantinya kepentingan masing-masing dapat terpenuhi. Hal-hal tersebutlah, yang selalu dilakukan oleh pengurus takmir dalam menyikapi dampak pembangunan jalan tol.

Dalam perjalanannya, pengurus takmir menjelaskan tidak ada dampak signifikan yang dirasakan saat penggusuran pemukiman disekitar masjid dilakukan. Pihak pengurus menjelaskan bahwa belum ada kendala yang serius pasca penggusuran yang ada, karena masjid Baitul Mustaghfirin saat ini masih berdiri kokoh ditengah proyek tol dan masih digunakan seperti biasanya. Adanya penggusuran yang terjadi berdampak pada berpindahannya beberapa pengurus maupun jamaah masjid Baitul Mustaghfirin ke tempat lain, sebagai akibat lokasi tempat tinggal mereka terkena pembangunan jalan tol. Di satu sisi, bangunan masjid baru yang belum selesai, mengakibatkan belum adanya rapat kembali untuk menentukan

pengganti pengurus takmir yang telah berpindah ke tempat lain. Pertemuan baru akan dilakukan oleh pengurus takmir setelah bangunan masjid baru sudah bisa digunakan.

Sedangkan kendala yang dihadapi pengurus dan masyarakat di Beringin *Kulon* adalah letak masjid baru yang belum selesai dan yang lama masih berdiri kokoh ditengah-tengah jalan tol, dirasakan adanya penurunan jamaah yang dianggap oleh pengurus sebagai akibat letak masjid yang berada dikawasan proyek dan beberapa jamaah yang semula di sekitar masjid banyak yang berpindah rumah.



Gambar 2: Masjid Baitul Mustaghfirin yang baru masih dalam tahap pengerjaan

2. Ponpes YPMI Al-Firdaus

Pondok Pesantren Yayasan Pembina Mahasiswa Islam (YPMI) Al-Firdaus adalah pondok pesantren yang dibangun untuk mahasiswa Islam yang sedang melanjutkan studinya diperguruan

tinggi di wilayah kota Semarang. Dengan latar belakang keinginan yang kuat dalam membina mahasiswa Islam dilingkungan kota Semarang, maka beberapa pengurus wilayah Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) dan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Tengah mengusahakan agar adanya wadah pembinaan mahasiswa. Akhirnya didirikanlah ponpes YPMI al-Firdus.³

Awalnya, ponpes YPMI Al-Firdaus terletak di jalan Honggowongso, dengan luas tanah kurang lebih 1000 meter, dan merupakan markas atau sekretariat Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Tengah yang selanjutnya, diinisiasi oleh beberapa tokoh PMII menjadi pondok pesantren mahasiswa Islam pada tahun 1993. Mereka antara lain Umar al-Faruq, Satrian Abdurrahman, dan pengurus PKC PMII. Pada tahun tersebut, Ponpes YPMI Al-Firdaus mulai dibangun dan peletakan batu pertama diresmikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan K.H.Sahal Mahfud.

³Wawancara dengan Sugeng, salah seorang pengelola Ponpes pada tanggal 26 Juni 2018



Gambar 3: Ponpes YPMI al-Firdaus lama di jalan Honggowongso, Ngaliyan

Dengan struktur kepengurusan pembina dan pengurus ponpes dari awal sampai sekarang pun telah mengalami beberapa perubahan, dikarenakan beberapa pengurus sudah wafat, maka struktur tersebut, diperbarui.

Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pembina dan pengurus ponpes YPMI AL-Firdaus dalam rangka peningkatan kualitas akademik dan keagamaan mahasiswa. Selain itu, kegiatan dalam rangka peningkatan *life skill* juga menjadi konsen pengurus ponpes untuk menunjang santri. Kegiatan *life skill* yang diadakan ponpes tersebut, seperti: pelatihan menjahit, pelatihan Jurnalistik, dan pelatihan computer bertujuan membekali kemampuan dan keterampilan santri.. Santri dalam setiap kegiatan ponpes, diungkapkan pengurus sangat antusias, yang tentunya membuat aktivitas ponpes berjalan lancar. Hanya saja,

lokasi ponpes yang lama, memang dirasa pengelola ponpes kurang strategis dan terbatas lahan. Akhirnya, penerimaan santri pun terbatas dan hanya bisa menampung sekitar 50 santri. Dan lebih baik lahan yang baru karena dianggap lebih luas.

Upaya pembangunan infrastruktur Nasional oleh pemerintah dalam pembangunan jalan tol, yang berakibat tergusurnya banyak lahan dan bangunan termasuk ponpes YPMI AL-Firdaus. Maka dalam menyikapi penggusuran, pihak ponpes merasa diuntungkan, karena dengan demikian bisa mencari lahan yang lebih strategis ketimbang lahan yang lama. Dan pada akhirnya, mendapat lahan baru di daerah Silayur, yang dirasa tempat saat ini lebih strategis.

Beberapa pertimbangan untuk jalan keluar agar santri tidak merasa keberatan direlokasi dilakukan oleh pihak pengurus ponpes, seperti: pertimbangan dekat dengan kampus, dekat akses jalan umum, tempat lebih strategis, dekat dengan beberapa pengurus dan pengelola ponpes. Maka lahan yang baru ini, dirasa pihak pondok sangat cocok dan lebih baik dari sebelumnya.

Selain hal tersebut, jalan keluar yang dilakukan pengurus pondok adalah memperluas lahan ponpes, yang semula 1000 meter menjadi 4000 meter. Menurut penuturan salah satu pengurus, menjelaskan bahwa dana ganti lahan lama, hanya untuk membeli

lahan baru yang luasnya mencapai empat kali lipat tersebut.

Kemudian pembangunan fisik bangunan menurut penuturan pengurus, diantisipasi dengan mencari bantuan dari pengurus maupun pihak luar. Hasilnya juga dirasakan oleh pengurus dengan hasil yang sudah ada, bantuan berupa Gazebo didapat dari salah satu pengurus ponpes sendiri. Bantuan dua gedung baru, masing-masing dari dana bantuan Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Upaya untuk mendapatkan bantuan ini sebenarnya telah diagendakan oleh PKC PMII Jawa Tengah sudah cukup lama, dan suatu saat pasti akan berhasil. Bersamaan dengan adanya penggusuran, apa yang pernah diangankan oleh PKC PMII Jawa Tengah akhirnya bisa terealisasi.⁴ Bangunan fisik tersebut, menurut pengurus ponpes sangat bermanfaat bagi pengembangan ponpes YPMI Al-Firdaus agar kedepannya lebih baik dan mampu mencetak santri-santri berkualitas.

Adanya penggusuran atau relokasi ponpes YPMI Al-Firdaus dari lokasi lama ke lokasi yang baru dirasakan menjadi berkah tersendiri bagi pengurus ponpes maupun santri, hal ini diungkapkan oleh Sugeng, salah satu pengurus pondok yang diwawancari peneliti. Menurutnya, dengan lahan yang

⁴Wawancara dengan Ahmad Ali Munir pada tanggal 16 Juli 2018

baru ini, pihak ponpes bersyukur karena bisa mengembangkan pondok agar lebih baik dari segi tempat, kualitas dan kuantitas santri, serta kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Sugeng, dibanding tempat yang lama, yang baru sekarang ini lebih strategis dan lebih bisa membaur dengan masyarakat. Karena lokasi yang lama kurang strategis dan terletak agak dipojok, yang menyebabkan akses ke masyarakat juga terbatas. Dan dengan lokasi yang baru ini, Sugeng berharap santri bisa lebih meningkatkan aktivitas sosialnya. Karena dekat dengan masyarakat. Menurutnya, selama berada di lokasi baru ini, santri tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Apalagi, menurut Sugeng, masyarakat juga dianggap bisa *guyub* dengan santri dan menerima baik adanya rencana pembangunan ponpes diwilayah tersebut. Selain itu, RT dan RW sekitar juga dirasa ada kepedulian dengan pondok. Bahkan Sugeng menuturkan, bahwa RT lebaran kemaren juga ikut memantau wilayah ponpes yang rata-rata ditinggalkan oleh santri yang mudik lebaran



Gambar 4: Gedung Ponpes YPMI al-Firdaus, Ngaliyan, Semarang

3. TK ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 54⁵

TK ABA (‘Aisyiyah Bustanul Athfal) 54 semula berada di Jalan Gatot Subroto No. 743 Bambankerep – Ngaliyan Semarang, berdiri di atas tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah seluas 2.127 m² . Awal mulanya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Ngaliyan hendak mendirikan sebuah amal usaha yang bergerak di bidang pelatihan kerja atau LPK di komplek masjid at-Taqwa yang berada di Jl. Gatot Subroto No.743 tersebut, nama lembaga pelatihan kerja dimaksud adalah LPK (Lembagas Pelatihan Kerja) Sinar Mentari dengan focus membuka kursus/pelatihan untuk profesi baby sitter dan atau nany.

⁵Wawancara dengan Nanik Sari Asih (Kepala TK ABA) pada tanggal 10 Agustus 2018

Begitu pengumuman pendaftaran LPK Sinar Mentari dibuka, yang berminat mendaftar tidak banyak. Di luar dugaan, justru yang berbondong-bondong datang dan kepingin mendaftar adalah anak-anak usia TK/PAUD, sementara yang mendaftar LPK, pendaftaran dibuka semala 1 bulan yang mendaftar 5 orang. Akhirnya atas kesepakatan musyawarah pimpinan PCM Ngaliyan yang itu diketahui oleh Bp Salim AR, dan sekretaris Bp. Drs. Mubaidi, dibantu tokoh-tokoh masyarakat seperti Bp Drs. KH. Hifni Syadzali, , Bp H.R. Darwanto, Bp Drs. H. Djamhuri, dr. H. Noor Yazid, Bp M. Masrur, Bp. Suyoto, Ibu Dra. Afifatun, Ibu Suwarni dan bu Nanik S. Asih, maka didirikanlah TK ABA yang saat itu masih menginduk TK ABA 31 Mangkang, selanjutnya pengurus PCM Ngaliyan membentuk Ranting Aisyiyah Purwoyoso yang akan menaungi TK ABA yang akan didirikan di wilayah Ranting Purwoyoso-Bambankerep. Hal ini karena keterbatasan personil anggota 'Aisyiyah di wilayah Bambankerep pada tanggal 1 April 2015 didirikanlah TK ABA dengan jumlah murid di tahun pertama sejumlah 60 anak. Di bawah naungan Pimpinan Ranting Asiyiyah (PRA) Purwoyoso–Bambankerep dengan diketahui oleh Ibu Hj. Suhaimi dengan Dikdasmen PCA Ibu Dra. Afifatun dengan menunjuk kepada sekolah (TK) Ibu Suwarni Suyato yang kebetulan juga ikut memprakarsai berdirinya TK PEMBINA ABA 54. Namun berjalannya waktu,

karena Ibu Suhaimi pindah ke Jakarta, maka kepengurusan Ranting Purwoyoso diganti dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Ibu S Adiyani Darwanto

Sekretaris : Ibu Hajar Fadhol

Bendahara : Ibu Sri Narti Kasnari

Dikdasmen : Ibu Suwarni Suyato

Sekretaris : Ibu Suratman

Bendahara : Ibu Moenirah Djamhuri

Majelis Dakwah: Ibu Yusron dan Ibu Mutiah

Kepala TK : Nanik Sari Asih, S.Ag

Dalam perjalanan waktu, TK ABA harus berdiri sendiri, maka Pimpinan PRA mengajukan nomor urut sekolah TK ABA kepada Pimpinan Majelis Dikdasmen PDA Kota Semarang dan pada bulan Juli 2006, diberilah nomor urut : 54. Sehingga nama sekolah ini menjadi TK PEMBINA ABA 54 dan pada bulan Juli 2006 Pimpinan PRA Purwoyoso_Banbankerep langsung membuka layanan pendidikan “Kelompok Bermain (KB/Play Group)” sehingga dan mendapat nomor urut dari PDA : 18, sehingga namanya menjadi KB ‘Aisyiyah 18.dan Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Semarang belum terbit. Karena proses pengurusan yang amat sulit dari segi birokrasi di tingkat UPTD Kecamatan Ngaliyan.

Pada tahun 2007, TK PEMBINA ABA 54 resmi mendapat ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota

Semarang dengan Nomor : SK 050.7/5830 setelah melewati jalan yang panjang, terjal dan berliku karena 2.5 mengurus perizinan pendirian sekolah TK PEMBINA ABA 54 baru berhasil.

Seiring berkembangnya jumlah siswa, pada tahun ketiga (2007) jumlah siswa meningkat menjadi kurang lebih 85 disamping karena perizinan pendirian TK dari Dinas Pendidikan Kota Semarang juga sudah diperoleh, selanjutnya Pimpinan PRA awal tahun 2007 mengajukan proposal bantuan block grand pembangunan TK swasta menjadi TK Pembina tingkat kecamatan kepada kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah yang saat itu yang menjadi kepala Dinas adalah Bp. H. Widadi, SH, dan alhamdulillah pengajuan proposal disetujui sehingga pada akhir tahun 2007, TK ABA 54 mendapatkan dana block grant untuk biaya pembangunan gedung sebagai TK Pembina Swasta dengan total dana sebesar Rp 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*). Setelah pembangunan proyek TK Pembina selesai, pada pertengahan tahun 2008, kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang memberikan SK tentang nama TK PEMBINA ABA 54 menjadi TK Pembina ABA 54 dengan No. SK 420/4287.

TK yang baru berusia 3 tahun tersebut mendapat tantangan baru dengan adanya rencana pembangunan jalan tol Semarang-Batang. Sosialisasi rencana proyek pembangunan jalan Tol di wilayah

Ngalihan berlangsung sejak tahun 2008, disamping sosialisasi juga diikuti oleh pengukuran dan pemberian tanda ke sejumlah titik lahan yang nantinya akan terkena proyek jalan tol Semarang-Batang tersebut, tak terkecuali lahan amal usaha Muhammadiyah yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.173 Purwoyoso_Bambakerep Ngalihan Semarang, dimana di lokasi tersebut berdiri sejumlah bangunan antara lain : Masjid at-Taqwa, sekolah TK Pembina ABA 54 & Play Group 18 Semarang dan Gudang TK ABA.



Gambar 5: TK ABA lama yang berlokasi di Jl Gatot Subroto

Namun sosialisasi proyek pembangunan jalan Tol Semarang –Batang tersebut sejak akhir 2008 sampai akhir tahun 2015 tidak ada progress sama sekali alias “mandeg”. Baru mulai pada awal tahun 2016, mulai ada info lagi kalau proyek pembangunan

jalan Tol Semarang-Batang tersebut akan ditindaklanjuti kembali, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Pengukuran ulang ke beberapa lahan yang akan terkena proyek pembangunan jalan Tol Semarang-Batang oleh Tim BPN Kota Semarang
- Sosialisasi hasil pengukuran : lahan, bangunan, tanaman dan fasilitas lainnya
- Komplain hasil pengukuran
- Pihak appraisal menawarkan harga ganti rugi lahan, bangunan, tanaman ke pemilik
- Complain besaran harga penawaran ganti rugi lahan yang sudah dikeluarkan oleh pihak appraisal.
- Persetujuan pemilik lahan/bangunan atas besaran uang ganti rugi dan penyerahan sertifikat asli serta surat-surat kelengkapan administrasi lainnya ke panitia pembebasan lahan (BPN Kota Semarang).
- Pembayaran ganti rugi lahan terkena proyek pembangunan jalan Tol Semarang-Batang.

Lokasi sekolah TK PEMBINA ABA 54 dan Play Group 18 Ngaliyan Semarang adalah sangat strategis, berada di tepi Jl. Raya Gatot Subroto Purwoyoso_Bambankerep Ngaliyan, berada di tengah-tengah kampung yang padat hunian serta dekat dengan perumahan Pasadena dan Wisma Brimob, sejak awal berdiri tahun 2005, TK PEMBINA ABA 54 tidak pernah kekurangan murid/peserta didik, bahkan di

bandingkan perolehan jumlah murid dengan sekiolah TK yang ada di wilayah kelurahan Bambankrep_Purwoyoso, selalu mendapatkan murid di atas TK lainnya, lebih-lebih setelah berstatus sebagai TK Pembina Swasta, kepercayaan masyarakat sekitar terhadap keberadaan TK PEMBINA ABA 54 semakin tinggi.

Daya tarik masyarakat terhadap TK PEMBINA ABA 54, disamping karena lokasinya yang setrategis, bisa jadi disebabkan juga oleh karena biaya pendidikan yang terjangkau dan kehandalan para guru dalam mendidik putra putri masyarakat yang telah dititipkan untuk dididik di sekolah tersebut, berbagai kejuaran sekolah sudah pernah diraih oleh TK PEMBINA ABA 54, seperti :

- Juara drumband tingkat 1 Jawa Tengah, di wonderia, tahun 2017
- Juara sekolah sehat se kota Semarang

Tapi, seperti kata pepatah “malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih”, begitu sosialisai rencana penggusuran lahan terkena proyek jalan tol Semarang-Batang dari pihak BPN Kota Semarang diputuskan bahwa lokasi sekolah TK PEMBINA ABA 54 dan Play Group 18 Semarang akan terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut, pihak sekolah dan yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh PRA dan PCM Ngaliyan segera mengambil langkah-langkah proaktif dan produktif untuk mencari solusi

perpindahan sekolah ke tempat lain dalam waktu yang tidak begitu lama.

Perlu diketahui bersama, bahwa setelah pihak BPN membayar lunas uang ganti rugi lahan terkena proyek tol, pemilik lahan diberi waktu maksimal 3 bulan untuk segera pindah ke lokasi lain, karena setelah uang ganti rugi diterima, lahan yang semula milik Muhammadiyah/TK PEMBINA ABA 54 itu sudah beralih pemilik menjadi lahan milik Negara yang segera akan dibangun proyek jalan tol itu.

Terhitung sejak akhir Desember 2016, Muhammadiyah Kota Semarang telah menerima uang ganti rugi dari BPN atas pembebasan lahan seluas 2.127 m², bangunan Masjid dan Sekaloh serta ganti rugi usaha sebesar ± Rp. 16 Milyar, sehingga maksimal Akhir Maret 2017 dideadline oleh BPN dan PT. Waskita Karya selaku penggarap proyek Tol bahwa Masjid at-Taqwa Gatot Subroto dan Komplek Sekolah TK PEMBINA ABA 54 harus sudah pindah dan dibongkar.

Pada tanggal 08 Desember 2016, pemerintahan Jokowi mencanangkan proyek Jalan Tol Semarang – Batang. Ternyata tanah milik Perserikatan Muhammadiyah yang ditempati TK Pembina ABA di jalan Gatot Subroto No. 743 terkena proyek tersebut, sehingga Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang yang diberi wewenang oleh PP Muhammadiyah mendapatkan ganti rugi sebesar 15 M

(yang terdiri dari ganti rugi bangunan, tanah dan usaha). Pada tahun 2018 TK Pembina ABA 54 akan direlokasi di jalan Srikaton Timur (Belakang Masjid Al Amin).



Gambar 6: TK ABA yang berlokasi di Jl. Srikaton Timur

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, TK Pembina ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 54 Semarang mempunyai visi membina anak meningkatkan ke-Taqwa-an (keimanan), Ibadah, Muamalah (Akhlakul Karimah), Cerdas dan terampil. Untuk mewujudkan visis tersebut, misi yang ditetapkan oleh pendidikan di TK Pembina ‘Aisyiyah Bustanul Athfal 54 Semarang adalah:

- a. Membekali perkembangan anak dengan keimanan dan keilmuan sehingga mereka menjadi anak beriman, bertaqwa dan berilmu pengetahuan.

- b. Mengembangkan potensi anak sedini mungkin sehingga berkembang kemandirian dan kemampuannya.
- c. Mewujudkan suasana kondusif dan demokratis dalam perkembangan dan pertumbuhan anak selanjutnya.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh TK Pembina ABA 54 adalah:

- a. Mengembangkan kurikulum yang mengkolaborasikan antara ilmu dan moral.
- b. Meningkatkan kemampuan siswa, guru serta pegawai dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif.
- c. Menciptakan hubungan sosial yang harmonis antar warga sekolah dalam rangka mewujudkan suasana sekolah yang kondusif.
- d. Mengembangkan metode pembelajaran yang praktis, fun, play role dan visioner dengan melakukan kontrol layanan secara ketat.

4. Majelis Taklim Muhammadiyah

Satu fenomena keumatan yang cukup menggembirakan dalam perkembangan dakwah dan pendidikan Islam di tengah-tengah masyarakat muslim Nusantara adalah tumbuh suburnya majelis-majelis taklim. Baik di perkotaan maupun di pelosok-pelosok desa dan kampung, banyak muncul kegiatan pendidikan Islam nonformal ini. Keberadaan majelis

taklim bersanding dinamis bersama lembaga sejenis seperti pesantren, madrasah diniyah, TPA/TPQ, dan balai pengajian. Melalui aktifitas yang dilakukakannya, majelis taklim ikut serta memberikan sumbangsihnya bagi pencerdasan mental spiritual umat Islam.

Dimaklumi, bahwa majelis taklim pada umumnya lahir dan tumbuh dari masyarakat, terutama masyarakat muslim yang mempunyai perhatian terhadap pendidikan Islam. Masyarakat sebagai pendiri majelis taklim dapat berupa individu, pengurus masjid, kalangan profesi, organisasi keagamaan, atau kelompok masyarakat lainnya. Pengelolaannya bisa di bawah koordinasi lembaga masyarakat, instansi pemerintah, atau lembaga majelis taklim itu sendiri.

Adanya majelis taklim atau kelompok pengajian tersebut, menurut **Mahbub Fauzie** bila ditelusuri eksistensinya dapat dilihat sebagai berikut : Ada yang di bawah naungan lembaga majelis taklim dalam skala luas seperti Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT); Ada yang dikoordinir oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jami'atul Al-Washliyah, dan lain-lain; Ada yang dibentuk oleh IPHI seperti Majelis Taklim Al-Mabrurah, dan masih banyak lagi majelis taklim-majelis taklim yang berdiri secara mandiri di tengah-tengah masyarakat dalam

bentuk kelompok-kelompok pengajian di dusun dan di kampung-kampung.⁶

Muhammadiyah dalam dinamikanya tidak pernah bisa dilepaskan dari aktivitas pengajian dan peran dari majelis-majelis ta'limnya. Dengan adanya majelis ta'lim maupun pengajian, maka dengan sendirinya roda silaturahmi warga Muhammadiyah akan terus terjaga. Silaturahmi ini penting untuk menumbuhkan kembali dan menguatkan Gerakan Jama'ah Dakwah Jama'ah (GJDJ) Muhammadiyah yang merupakan ciri khas dari gerakan dakwah Muhammadiyah.

Salah satu majelis taklim yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Ngaliyan adalah kegiatan pengajiyan rutin setiap akhir bulan (Ahad, minggu ke-4) yang dimotori oleh Majelis Tabligh PCM Ngaliyan, sejak awal mula perintisan, kegiatan pengajiyan ini bertempat di Masjid Taqwa Muhammadiyah Jl. Gatot Subroto No.743 Purwoyoso Semarang, waktu pengajiyan mulai j.07.00 – 09.00 WIB, pengajiyan ini diikuti oleh jamaah Bapak Ibu, jumlah jamaah yang biasanya hadir dalam pengajiyan yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh PCM Ngaliyan ini berkisar antara 50 – 100 orang.

⁶ **Mahbub Fauzie** dalam <http://aceh.tribunnews.com/2013/02/08/majelis-taklim-dan-partisipasi-umat>

Pengelolaan majelis taklim Muhammadiyan Ngaliyan ini berada dibawah kepengurusan Majelis Tabligh PCM Ngaliyan, dengan susunan pengurus periode 2016-2020 sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Suroto
Sekretaris : H. Herdiyanto, SH.
Bendahara : H. Isrob
Anggota - Drs. H. Ahmad Najib
- H. Maulana
- HM. Surawan
- H. Sunyoto

Seperti keberadaan sekolah TK Pembina ABA 54 NGaliyan Semarang di atas, bahwa lokasi pengajian Majelis Taklim Muhammadiyah Ngaliyan Semarang adalah di Masjid Taqwa Muhammadiyah Jl. Raya Gatot Subroto Purwoyoso_Bambankerep Ngaliyan Semarang, kebedaaan masjid ini sangat setrategis, berada di tepi, berada di tengah-tengah kampung yang padat hunian serta dekat dengan perumahan Pasadena dan Wisma Brimob, sejak awal berdiri tahun 1980-an, di Masjid Taqwa Muhammadiyah ini tidak pernah sepi dari kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah 5 waktu, TPQ, Pengajian Majelis Taklim PCM Ngaliyan dan lain sebagainya.

Tapi, seperti kata pepatah “malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih”, begitu sosialisai

rencana penggusuran lahan terkena proyek jalan tol Semarang-Batang dari pihak BPN Kota Semarang diputuskan bahwa lokasi Masjid Taqwa Muhammadiyah tersebut akan terkena proyek pembangunan jalan tol tersebut, pihak sekolah dan yayasan yang dalam hal ini diwakili oleh PRA dan PCM Ngaliyan segera mengambil langkah-langkah proaktif dan produktif untuk mencari solusi perpindahan sekolah ke tempat lain dalam waktu yang tidak begitu lama.

Perlu diketahui bersama, bahwa setelah pihak BPN membayar lunas uang ganti rugi lahan terkena proyek tol, pemilik lahan diberi waktu maksimal 3 bulan untuk segera pindah ke lokasi lain, karena setelah uang ganti rugi diterima, lahan yang semula milik Muhammadiyah/TK Pembina ABA 54 itu sudah beralih pemilik menjadi lahan milik Negara yang segera akan dibangun proyek jalan tol itu, bahkan bahkan pada saat penelitian ini berlangsung lokasi Masjid Taqwa Muhammadiyah tersebut sudah berubah menjadi Flay Over Jembatan Tol Semarang-Batang.



Gambar Lokasi kegiatan Majelis Taklim Muhammadiyah Ngaliyan

Sebagaimana sudah disebutkan diatas bahwa terhitung sejak akhir Desember 2016, Muhammadiyah Kota Semarang telah menerima uang ganti rugi dari BPN atas pembebasan lahan seluas 2.127 m², bangunan Masjid dan Sekaloh serta ganti rugi usaha sebesar ± Rp. 16 Milyar, sehingga maksimal Akhir Maret 2017 dideadline oleh BPN dan PT. Waskita Karya selaku penggarap proyek Tol bahwa Masjid at-Taqwa Gatot Subroto dan Komplek Sekolah TK Pembina ABA 54 harus sudah pindah dan dibongkar.

Tidak seperti pemindahan sekolah TK Pembina ABA 54 yang butuh kajian mendalam, survey harga tanah, mencari kontrakan rumah untuk pemindahan sekolah sementara, menyiapkan desain bangunan dan lain sebagainya, proses pemindahan lokasi pengajian Majelis Taklim Muhammadiyah ini cukup simple dan cepat. Yakni, mencari lokasi tempat pengajian yang tidak terlalu jauh dari lokasi awal tetapi juga akses

transportasinya mudah dijangkau serta lokasinya strategis, ketemulah di Musholla Kampus AIS (Akademil Ilmu Statistik) Muhammadiyah Jl. Prof. Hamka km. 05 Ngaliyan Semarang.

BAB IV

**STRATEGI LEMBAGA KEAGAMAAN
MENGHADAPI DAMPAK PEMBANGUNAN
JALAN TOL
DI KOTA SEMARANG**

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, ada cukup banyak lembaga keagamaan yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol di Kota Semarang. Mereka harus berusaha secara cerdas menyikapi terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Tentu saja sebagai sebuah lembaga keagamaan, tidak bisa keluar dari citra diri lembaga yang membawa nilai-nilai agama dalam setiap kebijakannya. Dengan kata lain agama memainkan peran yang penting dalam menyikapi pengrusakan akibat adanya pembangunan jalan tol. Termasuk dalam hal ini

adalah pilihan strategi yang dilakukan oleh lembaga keagamaan di Kota Semarang

A. Peran Agama dalam Membentuk Respon

Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang sosial, pendidikan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian dan lain sebagainya. Perubahan sosial yang terjadi memberi efek bagi masyarakat secara menyeluruh, perubahan di satu bidang akan diikuti perubahan di bidang lainnya. Salah satu bagian dari perubahan sosial terdapatnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari perubahan sosial masyarakat bisa berbentuk positif dan juga bisa berbentuk negatif. Dalam hal ini perlu ada benteng nilai dan norma yang bisa mengarahkan manusia dalam mengikuti perubahan sosial masyarakat yang terjadi dengan semakin pesat. Agama dalam konteks ini memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai ragam fenomena dan fakta-fakta sosial, yang ada di dalamnya. Dalam pergaulan sosial di masyarakat munculnya berbagai kemajuan mempengaruhi perilaku dan pola bersikap warga masyarakat. Banyak perilaku-perilaku yang menyimpang

yang ditemukan dalam masyarakat, yang pada tahap selanjutnya bisa mengganggu ketentraman masyarakat.

Keseimbangan sosial merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu hal di mana lembaga-lembaga masyarakat yang pokok berfungsi dalam masyarakat dan saling berintegrasi. Keadaan demikian membuat warga masyarakat merasa aman dan tenteram, oleh sebab tidak adanya pertentangan pada aturan-aturan yang berlaku. Setiap kali ada gangguan terhadap adanya keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya, atau merubahnya.

Lembaga-lembaga keagamaan seperti madrasah, masjid, pondok pesantren dan majlis taklim sebagai bagian dari institusi sosial mempunyai posisi yang strategis dalam hal ini. Strategis karena lembaga tersebut yang berusaha dengan sungguh-sungguh mengawal, menegakkan dan memertahankan nilai-nilai agama agar tetap eksis di masyarakat.

Masalah agama memang tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain : 1. Berfungsi Edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi

menyuruh dan melarang. Kedua unsur tersebut mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

2. Berfungsi Penyelamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan para penganutnya melalui : pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan.

3. Berfungsi Sebagai Pendamaian. Melalui agama seseorang yang bersalah/berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa

4. Berfungsi Sebagai Kontrol Sosial. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara individu maupun kelompok karena : a. Agama secara instansi, merupakan norma bagi pengikutnya. b. Agama secara ajaran mempunyai

fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu, kenabian). c. Berfungsi Sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas d. Berfungsi Transformatif Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang/kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadang kala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu. Ajaran agama mendorong dan mengajak penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.

5. Fungsi memupuk Persaudaraan. Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis ialah kesatuan manusiamanusia yang didirikan atas unsur kesamaan.

- Kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama, seperti liberalism, komunisme, dan sosialisme.

- Kesatuan persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama. Bangsa-bangsa bergabung dalam sistem kenegaraan besar.

•Kesatuan persaudaraan atas dasar se-iman, merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja melainkan seluruh pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercayai bersama.

6. Fungsi transformatif. Fungsi transformatif disini diartikan dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat.

7. Berfungsi Sublimatif. Ajaran agama Islam mengfokuskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat ukhrawi melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus karena dan untuk Allah merupakan ibadah. Selaian itu peran agama dalam masyarakat ditengah perubahan sosial yang terjadi juga berfungsi sebagai doktrin yang menjadi sumber nilai bagi pembentukan kepribadian, ideologi bagi gerakan sosial dan perekat hubungan sosial.⁷

Doktrin agama manapun yang dianut oleh komunitas manapun di belahan dunia ini mengajarkan

⁷ Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern,,Jakarta:Kencana Pranada Media Group,2010, hlm.86.

kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang baik manusia yang jujur, manusia yang memiliki kasih sayang, mencintai kedamaian dan membenci kekerasan dan lain sebagainya. Secara substansi ajaran agama memberikan kerangka norma yang tegas bagi tingkah laku umatnya, nyaris sulit ditemukan doktrin-doktrin agama wahyu yang tidak mengajarkan hal-hal yang baik kepada pemeluknya. Dalam menghadapi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat setiap pemeluk agama yang taat akan menggunakan doktrin ajaran agamanya untuk menghadapi segala kondisi yang ada dalam lingkungan kehidupannya, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang negative sebagai hasil dari perubahan sosial yang ada.

Selanjutnya dalam kehidupan seorang individu sebagai makhluk sosial, Agama Islam dalam kehidupannya berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas ditengah gelombang terjadinya perubahan-perubahan sosial. Dalam membentuk sistem nilai dalam diri individu adalah agama segala bentuk simbol-simbol keagamaan,

mukjizat, magis, maupun upacara ritual sangat berperan dalam proses pembentukan sistem nilai dalam diri seseorang. Setelah terbentuk, maka seseorang serta merta mampu menggunakan sistem nilai ini dalam memahami, mengevaluasi, serta menafsirkan situasi dan pengalaman.

Dengan kata lain sistem nilai yang dimilikinya terwujud dalam bentuk norma-norma tentang bagaimana sikap diri. Nilai adalah daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Dilihat dari fungsi dan peran agama dalam memberi pengaruhnya terhadap individu baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup, maka pengaruh yang paling penting adalah sebagai pembentuk kata hati. Pada diri manusia telah ada sejumlah potensi untuk memberi arah dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut antara lain insting, indra, nalar dan agama. Melalui pendekatan ini, maka agama Islam sudah menjadi potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendekatan ini, maka pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat.

Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik juga merupakan harapan. Agama

Islam berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik dan sebagai petunjuk bagi manusia karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Sebaliknya, agama juga sebagai pemberi harapan bagi pelakunya, dimana seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang ghaib (supernatural).

Fakta sosial lainnya yang berkaitan dengan bahasan ini adalah menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki Stratifikasi sosial yang juga diistilahkan dengan pelapisan sosial adalah merupakan kedudukan yang berbeda-beda mengenai pribadi manusia yang merangkaikan suatu sistem sosial yang ada dan perlakuannya sebagai hubungan orang atasan dan orang bawahan satu sama lain dalam hal-hal tertentu dalam masyarakat.⁸Stratifikasi sosial juga

⁸Darmawansyah,dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya,,: Usaha Nasiona,1986l, hlm. 151

menggambarkan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat terdapat perbedaan kedudukan seseorang dari kedudukan yang tinggi dan rendah seolah-olah merupakan lapisan yang bersap-sap dari atas ke bawah.⁹Demikian juga halnya dengan seorang individu mempunyai kedudukan dan status yang berbeda dalam masyarakat. Manusia dalam kehidupan bersama disamping mengadakan interaksi individu tidak jarang pula terjadi interaksi status, bahkan dalam kehidupan sehari-hari individu melakukan interaksi dengan banyak orang dari berbagai status tanpa mengenal pribadi lawan interaksinya. Kondisi seperti ini disatu sisi bisa menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat dalam hal ini norma-norma agama yang bisa meredamnya. Dalam setiap masyarakat tidak tergantung pada masyarakat dalam bentuk manapun senantiasa terdapat sikap penghargaan terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penghargaan yang tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal lainnya. Misalnya dalam masyarakat yang lebih menghargai kekayaan materiil maka mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan materiil akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang

⁹Arnizun Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm. 194.

lainnya. Gejala seperti ini menimbulkan lapisan masyarakat, yang merupakan pembedaan posisi atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda.¹⁰ Namun tentunya hal ini sangat berbeda dengan ajaran agama, dimana tidak terdapat pembedaan pembedaan yang mencolok antara pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menurut norma ajaran agama, semua manusia adalah sama kedudukannya dalam pandangan Tuhan.

Pada dasarnya masyarakat yang memiliki sistim lapisan masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap masyarakat berkedudukan dalam lapisan atasan dan mereka yang hanya memiliki sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Menurut Bossaerd dan Boll bahwa masyarakat itu pada awalnya terdiri dari small family (keluarga kecil) kemudian pada tahap selanjutnya menjadi masyarakat yang besar dan menjadi masyarakat yang berkelas-kelas.

¹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.197.

Menurutnya kelas sosial dalam masyarakat terdapat tiga yaitu : upper class, middle class dan lower class.¹¹

Masyarakat dalam menjalankan interaksi sosialnya menpedomani norma-norma, seperti norm agama dan norma sosial yang ada pada masyarakat bersangkutan. Manusia sering mendapat sebutan sebagai “homo homoni lupus” jika diselami hakikat kemanusiaan maka “homo homoni lupus” dan stratifikasi sosial adalah merupakan suatu kesenjangan sekaligus tantangan bagi eksistensi kemanusiaan, pertanyaan ini dapat dijawab dalam pembicaraan tentang stratifikasi social.¹² Ada tiga prinsip tentang stratifikasi sosial yaitu pertama : atribut kemanusiaan yang utama adalah akal pikiran yang membuatnya memandang kehidupan ini sebagai suatu rahasia yang harus dicarikan jawabannya, kedua atribut kebinatangan yang melekat pada manusia berupa nafsu menuntutnya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan menjadikan manusia tidak merasa puas atas apa yang telah diperolehnya. Ketiga ketidakpuasan manusia atas apa yang dicapainya dalam dua bidang tersebut menyebabkan terjadinya perlombaan antara yang satu dengan yang lainnya untuk saling mendahului dan

¹¹Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung : Bina Cipta, 1977, hlm.16.

¹²Peter Berger, *Humanism Sociology*, Jakarta : Inti Sari, 1985, hlm. 120.

menguasai. Ketiga prinsip stratifikasi sosial ini misalnya sebagai fakta sosial tentu kalau berjalan tanpa adanya norma-norma yang dipedomani masyarakat bisa dibayangkan akan seperti apa bentuk kehidupan masyarakat bersangkutan untuk memenuhi ambisinya dan ketidakpuasannya terhadap apa yang diinginkannya, disinilah agama berperan yang menawarkan norma-norma dan nilai-nilai ideal bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

Fakta sosial yang demikian yang pada umumnya terdapat dalam setiap bentuk masyarakat di satu sisi merupakan proses-proses sosial harus terus berjalan, maka dari itu peran agama sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya yang penuh dengan berbagai fakta sosial, agama dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan (way of life) setiap individu dalam masyarakat, sehingga bisa menghadapi efek yang ditimbulkan oleh adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Penutup Agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial baik secara cepat dan secara lambat. Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan bahkan di satu sisi masyarakat itu juga membutuhkan perubahan sosial, namun dalam hal ini tentu harus ada peran yang bisa mengimbangi atau menjadi pedoman

masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial yang terjadi. Salah satu bagian dari perubahan sosial adalah terjadinya lapisan sosial dalam masyarakat yang juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Agar dampak negatif dari perubahan sosial dan pelapisan sosial dalam masyarakat yang terjadi bisa diminimalisir bahkan diarahkan ke hal yang positif. Disinilah peran Agama Islam sangat sentral dalam menghadapi fenomena kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan sosial yang semakin cepat, ditandai dengan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang yang pada tahap selanjutnya memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan yang terjadi. Ibarat satu negara tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika tidak ada rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman kemana arah perjalanan negara bersangkutan.

Organisasi dari masyarakat yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibedakan menjadi tiga; institusi masyarakat lokal, organisasi yang bergerak berdasarkan motivasi, filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga organisasi merupakan organisasi sosial yang tidak berafiliasi dari pemerintah, karena lahir atas prakarsa masyarakat sendiri dan di luar sektor swasta, sehingga bergerak bukan berdasarkan profit semata. Sebetulnya ketiga organisasi masyarakat ini

merupakan organisasi yang melakukan pelayanan sosial dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Organisasi masyarakat yang bersifat local tumbuh sebagai bentuk aktualisasi dari pranata sosial dan sering pula didasarkan pada ajaran agama. Kondisi semacam ini, didorong oleh motivasi sosial dan religius. Realitas yang ada, terdapat organisasi local yang menjalankan sebagai pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan air minum, air irigasi, dan jaminan sosial seperti umbung paceklik, perkkumpulan kematian, dan pemeliharaan orang tua. Organisasi masyarakat banyak berorientasi pada ikatan lokalitas, ikatan keakraban, ikatan patron klien, prinsip timbal balik, dan solidaritas sosial. Organisasi yang berbasis masyarakat seperti ini biasanya memiliki kepemimpinan dan eksistensi yang kuat serta melibatkan banyak warga masyarakat dalam komunitas tertentu.

Walaupun organisasi ini bisa bergerak lebih fleksibel, tetapi pengelolaan terkadang tidak cukup efisien, sebab bersifat informal dan belum menggunakan manajemen yang rasional. Sesuai dengan karakteristiknya, institusi local dan tradisional memang efektif sebagai sarana mendorong sebuah kegiatan bersama. Organisasi masyarakat ini kurang efisien, dilihat dari sumber daya. Ini perlu sebuah pengembangan, tidak mengubah organisasi informal menjadi organisasi

formal, tetapi tetap mempertahankan ikatan local dan kepemimpinnya. Organisasi ini perlu ditambah sumber daya yang paham dan memiliki kemampuan menejerial yang baik.

Sekitar lingkungan masyarakat telah tumbuh juga organisasi sosial yang memberikan fungsi pelayanan sosial didorong prinsip filantropi. Organisasi ini ada yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat luas dan tetap memberikan pelayanan secara terus-menerus, seperti PMR. Kelebihan organisasi ini adalah lingkup aktivitas pelayanan sosialnya tidak terbatas wilayah local dan keakraban saja. Kelemahannya adalah pola kegiatan yang temporer seperti menggalang bantuan bagi korban bencana alam. Perkembangan organisasi sosial ini membutuhkan dukungan keberadaan nilai kemanusiaan yang universal.

Masyarakat memiliki energi dan potensi yang luar biasa. Hanya saja aktualisasi kegiatannya masih bersifat insidental. Kegiatan penyaluran sosial seperti ini, sebetulnya juga baik untuk dilakukan dalam sehari-harinya, karena masyarakat terdapat berbagai masalah yang butuh perhatian intensif. Perkembangan positif dari organisasi perwujudan kepedulian sosial yang merupakan aktualisasi dari nilai filantropi. Pada mulanya pelaksanaan kepedulian sosial bersifat insidental dan karikatif, makin berkembang dan mudah untuk dijumpai.

Organisasi masyarakat perlu sebuah institusi perantara yang membantunya meningkatkan potensi masyarakat dalam menyalurkan bantuan berdasarkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial filantropi. Institusi perantara juga perlu modal dibidang penguasaan jaringan dan kepercayaan sebagai lembaga yang bergerak dibidang media massa dengan misi khusus dalam kesejahteraan sosial. Institusi perantara ini dapat membantu untuk menyampaikan persoalan kelompok penyandang masalah.

Sebagai institusi sosial yang bergerak dalam bidang keagamaan, keempat lembaga keagamaan yaitu Masjid Baitul Mustaghfirin, Ponpes YPMI al-Firdaus, TK Pembina ABA 54 dan Majelis Taklim Muhammadiyah Ngaliyan tidak mengalami persoalan yang serius, bahkan dengan agama bisa menerima kebijakan pengusuran karena kebijakan tersebut diarahkan menuju kebaikan.

B. Pola Strategi Lembaga Keagamaan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain maupun kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok. Untuk itu manusia membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang

baru untuk dapat tetap hidup. Sebagaimana diungkapkan oleh Gerungan pada bagian sebelumnya adaptasi merupakan suatu proses untuk mencapai keseimbangan dengan lingkungan. Konsep adaptasi berhubungan dengan mekanisme penanggulangan masalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam lingkungannya. Karena itu istilah adaptif dikaitkan dengan kemampuan penyesuaian diri manusia di dalam suatu lingkungan baru, tingkah laku adaptif harus dihubungkan dengan respon yang sesuai dengan penden, yang dimiliki dan dipilih oleh seseorang dalam pengambilan keputusan. Tingkah laku adaptif dapat diketahui dari proses adaptif individu dan kelompok individu, baik berkaitan dengan masalah lama maupun baru, tanpa disertai perasaan cemas. Di dalam adaptasi juga terdapat pola-pola dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Menurut Sugiyono pola adalah suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah menetap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam hal menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri.

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi, Gerungan (dalam Yan Eryanti Mussa 2006:5). Definisi lain dari adaptasi

meminjam konsep yang dituangkan oleh Soemarwoto, bahwa adaptasi merupakan suatu upaya penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai kelenturan respon terhadap perubahan yang No Aspek Pengamatan Ya Tdk

1. Adanya kesadaran untuk bersilaturahmi dengan keluarga non muslim. }
2. Interaksi yang harmonis dengan keluarga yang non muslim. }
3. Saling berbagi dengan keluarga yang non muslim. }
4. Saling mengerti antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. }
5. Saling menghormati saat melakukan kegiatan ibadah. }
6. Membantu keluarga non muslim yang sedang ditimpa musibah. }
7. Ikut berpartisipasi dalam acara keluarga besar. }
8. Kemampuan untuk memahami dan mengontrol diri sendiri. }
9. Kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik. }
10. Kemampuan untuk ikut berpartisipasi di keluarga besar. }
11. Memiliki hubungan interpersonal yang baik. }

9 terjadi pada perubahan lingkungan, Soemarwoto (dalam Yan Eryanti Mussa 2006:6). Dalam proses kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, individu tidak dapat begitu saja melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan dirinya, karena individu tersebut mempunyai lingkungan diluar dirinya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan lingkungan ini mempunyai aturan dan norma-norma yang membatasi tingkah laku individu tersebut.

Penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial disebut dengan adjustment. Adaptasi lebih bersifat fisik, dimana orang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, karena hal ini lebih banyak berhubungan dengan diri orang tersebut. tingkah lakunya tidak saja harus menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan lingkungan sosialnya (adjustment). Begitu juga halnya dengan etnis tionghoa yang telah memeluk Islam, mereka juga berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik atau lingkungan sekitarnya, termasuk melakukan adaptasi dengan keluarganya yang non muslim. Adaptasi perlu dilakukan, agar eksistensi seseorang dapat diakui dan diterima dilingkungan sekitarnya, tanpa adanya adaptasi akan membuat jurang pemisah/gap seseorang dengan masyarakat semakin besar. Parsudi Suparlan (dalam Ida Bagus Heri Jumawan, 2008:2011), mengatakan adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan. Syarat-syarat dasar tersebut mencakup: (a) Syarat dasar alamiah-biologi (manusia harus makan dan minum untuk menjaga kesetabilan temperatur tubuhnya agar tetap berfungsi dalam hubungan harmonis secara menyeluruh dengan organ-organ tubuh lainnya). (b) Syarat dasar kejiwaan (manusia membutuhkan perasaan tenang yang

jauh dari perasaan takut, keterpencilan gelisah). (c) Syarat dasar sosial (manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaannya, untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh). Adaptasi sosial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa Muslim terhadap keluarganya yang non Muslim, merupakan salah satu contoh bahwa setiap manusia butuh pengakuan dari lingkungan sosialnya, karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Maka dari itu setiap manusia akan berupaya agar ia dapat diterima lingkungan sosialnya.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan percepatan ekonomi nasional, salah satunya melalui pembangunan. Pembangunan nasional yang merata dan berlandaskan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam ayat lima, dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pembangunan dan pemerataan di seluruh Indonesia, diupayakan oleh negara dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa, terutama persoalan infrastruktur sebagai sarana percepatan pembangunan dan ekonomi negara menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian, negara selalu berusaha mewujudkan cita-cita tersebut dengan

semakin gencar melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di pulau Jawa, melainkan menjangkau seluruh kawasan Terluar, Terdalam, dan Tertinggal (3T). Gencarnya pembangunan nasional memang menjadi fokus program kerja presiden dan seluruh jajarannya dari periode ke periode, terutama saat ini pembangunan infrastruktur secara masif terlihat pada pemerintahan presiden Joko Widodo-Jusuf Kala.

Pemerintah dengan segala upaya melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur negara, terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, sebagai bukti target pembangunan nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut, ada sepuluh komponen pembangunan strategis yang berusaha diwujudkan oleh pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur jalan tol, infrastruktur jalan nasional atau strategis nasional non-tol, pembangunan infrastruktur sarana dan pra-sarana kereta api antar kota, infrastruktur kereta api dalam kota, revitalisasi bandar udara, bandar udara baru, bandar udara strategis lainnya, pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, program satu juta rumah, pembangunan kilang minyak, pembangunan pipa gas atai minyak LPG, infrastruktur

energi asal sampah, penyediaan infrastruktur air minum, pembangunan tanggul penahan banjir, pembangunan bendungan dan beberapa infrasturtur pendukung lainnya.

Dari sekian banyak program pembangunan strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintahan era Joko Widodo-Jusuf Kalla tersebut di atas, peneliti akan membatasi dengan pembahasan pada pembangunan jalan tol yang sempat menjadi kajian dan perbincangan dalam masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, bahwa dalam rangka percepatan perwujudan pengusaha jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara financial, Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pengusaha jalan tol.

Pembangunan jalan tol dilakukan di beberapa provinsi besar di Indonesia sebagai upaya untuk kemudahan mobilisasi perekonomian yang diharapkan nantinya agar berimbas pada percepatan ekonomi

nasional. Di satu sisi, pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah juga berimbas pada masyarakat dan aspek pertanian, karena pembangunan jalan tol telah memakan lahan masyarakat yang tidak sedikit. Penggusuran sekian banyak lahan, bangunan, rumah, dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai konsekuensi logis diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan mewujudkan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam persoalan ini, menarik membahas dampak pembangunan jalan tol Batang-Semarang yang tak sedikit menyebabkan persoalan sengketa pembebasan lahan yang terjadi, seperti halnya kasus di Kabupaten Kendal, yang sampai berdampak pada banyaknya warga Kendal yang harus mengungsi di kompleks DPRD Kabupaten Kendal. Dari hal tersebut, yang menarik dan perlu dikaji secara mendalam adalah penggusuran lembaga-lembaga keagamaan yang terjadi sebagai akibat pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Oleh karena persoalan di atas, peneliti akan meneliti beberapa

lembaga keagamaan di kota Semarang yang terkena dampak pembangunan jalan tol sebagai bagian dari kebijakan nasional yang tidak bisa terhindarkan.

Pada akhirnya, walaupun lahan dan fisik bangunan pengganti masjid baitul Mustaghfirin yang baru sudah proses pembangunan, dengan ukuran lahan dan bangunan yang menurut pengurus takmir lebih luas dan lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, salah satu pengurus takmir, Qosim, berharap di tempat yang baru nantinya masyarakat akan lebih rajin dan nyaman beribadah dimasjid tersebut. Walaupun belum bisa digunakan, dia berharap agar bangunan yang baru bisa segera terselesaikan, karena letak tentunya lebih strategis karena letaknya dekat dengan akses jalan utama dan dekat dengan pemukiman warga. Di satu sisi, letak masjid baru dirasa tidak berpindah jauh dari lokasi yang sebelumnya, yang diharapkan pengurus takmir tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ada.

Secara karakteristik masyarakat, dirasakan qosim tidak ada perbedaan. Karena menurutnya, lahan baru yang didapat pengurus takmir tidak jauh dari lokasi lama dan masih dalam satu wilayah. Hal tersebut, menyebabkan tidak ada perbedaan signifikan karakteristik lingkungan lama dengan yang baru. Dalam beradaptasipun, menurutnya masyarakat tentunya tidak

ada kesulitan, karena masih dalam struktur dan kultur masyarakat yang sama.

Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Strategis Nasional mengharuskan relokasi ponpes YPMI Al-Firdaus ke lokasi yang baru, Gondoriyo, Beringin, Semarang, yang semula terletak di jalan Honggowongso, Ngaliyan, Semarang. Digusurnya lokasi ponpes YPMI Al-Firdaus sebagai akibat pembangunan jalan tol Batang-Semarang, tentu tidak dianggap sebagai musibah oleh pengurus pondok. Bahkan, menurut Sugeng, salah satu pengurus mengungkapkan bahwa adanya penggusuran ini malah membawa berkah bagi pondok. Mengapa demikian? Karena menurutnya, lahan lama dirasa kurang strategis melihat lahan tidak rata dan luasnya juga terbatas dan menghambat upaya renovasi dan pengembangan pondok.

Pembangunan infrastruktur Nasional oleh pemerintah dalam pembangunan jalan tol, yang berakibat tergusurnya banyak lahan, bangunan, dan lembaga keagamaan termasuk ponpes YPMI AL-Firdaus disikapi positif pihak pengurus. Pihak ponpes merasa diuntungkan, karena dengan demikian bisa mencari lahan yang lebih strategis ketimbang lahan yang lama. Pada akhirnya, mendapat lahan baru di daerah Gondoriyo, Beringin, yang dirasa lebih strategis dan luas

serta memudahkan pengurus untuk melakukan pengembangan.

Beberapa pertimbangan sebelum penggusuran sempat dipikirkan matang-matang oleh pengurus untuk jalan keluar agar santri tidak merasa keberatan direlokasi oleh pihak pengurus ponpes, seperti: pertimbangan dekat dengan kampus, dekat akses jalan umum, tempat lebih strategis, dekat dengan rumah beberapa pengurus dan pengelola ponpes. Setelah dipertimbangkan banyak hal tersebut, maka lahan yang baru ini, yang didapatkan oleh pengurus dirasa pihak pondok sangat cocok dan lebih baik dari sebelumnya. Selain hal tersebut, jalan keluar lainnya dilakukan pengurus pondok, yakni memperluas lahan ponpes, yang semula 1000 meter menjadi 4000 meter. Sugeng menjelaskan bahwa dana ganti lahan lama hanya cukup untuk membeli lahan baru yang luasnya mencapai empat kali lipat tersebut. Pembangunan fisik bangunan yang dilakukan, menurutnya diantisipasi dengan mencari bantuan dari pengurus maupun pihak luar. Hasilnya sumbangan didapatkan oleh pengurus sebagai modal awal membangun pondok untuk menampung dan sebagai tempat tidur santri. Bantuan selanjutnya berupa Gazebo yang didapat dari salah satu pengurus ponpes sendiri sebagai aula kegiatan. Sampai pada akhirnya, mendapatkan bantuan dua gedung baru, masing-masing

dari dana bantuan Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA). Bangunan fisik tersebut, menurut pengurus ponpes sebagai dampak positif penggusuran yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan ponpes YPMI Al-Firdaus agar kedepannya diharapkan bisa lebih baik dan mampu mencetak santri-santri berkualitas.

Relokasi ponpes YPMI Al-Firdaus dari lokasi lama ke lokasi yang baru dirasakan menjadi berkah tersendiri bagi pengurus ponpes maupun santri, hal ini ditegaskan oleh Sugeng, Menurutnya, dengan lahan yang baru ini, pihak ponpes bersyukur karena bisa mengembangkan pondok agar lebih baik dari segi tempat, kualitas dan kuantitas santri, serta kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Sugeng, dibanding tempat yang lama, tempat yang baru sekarang ini lebih strategis dan lebih bisa membaur dengan masyarakat. Alasan itu diungkapkannya karena lokasi yang lama kurang strategis dan terletak agak dipojok, yang menyebabkan akses ke masyarakat juga terbatas, disampingnya juga dihindangi oleh sekolah dan makam yang menyebabkan terbatasnya santri membaur di masyarakat.

Lokasi yang baru di daerah Silayur , diungkapkan sebagai tempat yang sangat strategis dalam sisi apapun,

maka dia berharap santri bisa lebih meningkatkan aktivitas sosialnya. Dekat dengan masyarakat menjadi alasan utama santri harus bisa membaur dengan baik di masyarakat sekitar. Menurut pengamatannya, selama berada di lokasi baru ini, dilihat santri tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Apalagi, menurut Sugeng, masyarakat sekitar ponpes YPMI Al-Firdaus juga dianggap bisa *guyub* dengan santri dan memang sebelum bangunan pondok jadi dan adanya rencana pembangunan ponpes, masyarakat sekitar sudah menerima baik adanya rencana pembangunan ponpes di wilayah tersebut. Jadi, setelah santri menetap di lahan yang baru tersebut, tidak ada kendala yang memberatkan santri, terutama dalam beradaptasi dengan masyarakat yang notabene baru bagi mereka.

Selain itu, RT dan RW sekitar juga ada kepedulian dengan pondok. Bahkan Sugeng menuturkan, bahwa RT lebaran tahun 2018 juga ikut memantau wilayah ponpes yang rata-rata ditinggalkan oleh santri yang mudik lebaran. Kondisi sosial-keagamaan yang baik dan mendukung pihak ponpes, membuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh santri, baik santri putra maupun santri putrid sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan oleh pengurus pondok. Dibanding lokasi ponpes yang lama, terbatas lahan dan penerimaan santri

pun terbatas dan hanya bisa menampung sekitar 50 santri. Sedangkan, lahan yang baru diungkapkan lebih baik karena lebih luas, dan tentunya bisa menampung lebih banyak santri untuk didik kecerdasan intelektual dan spiritualnya agar membentuk santri yang berakhlak mulia, cerdas, dan bermanfaat di masyarakat.

Tindakan strategi adaptasi sosial ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, memiliki kertekaitan dengan teori structural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott patson. Hal itu dikarenakan, masyarakat merupakan suatu sistem sosial dengan subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan berhubungan. Subsistemsubsistem yang ada di dalam masyarakat mengalami perubahan diakibatkan oleh pembangunan. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, ditujukan untuk mencapai keadaan seimbang dan teratur. Masyarakat akan senantiasa berusaha untuk menstabilkan keadaan yang berubah. Salah satunya adalah mengstabilkan kebutuhan dalam bidang sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam mempertahankan elemen tersebut agar tetap stabil, maka masyarakat melakukan empat prasyarat mutlak diantaranya yaitu adaptasi, *goal attainment*, integrasi dan latency. (Ritzer,G, dan Gouglas, J, 2011). Adaptasi (*adaptation*) dilakukan oleh petani dengan cara melakukan penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan dan sumber

daya yang berubah. Penyesuaian dilakukan dengan berbagai cara dan strategi baik aktif, pasif dan jaringan sosial. Tujuan dari strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak lain adalah untuk memenuhi tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan agar mendapatkan kehidupan yang tetap stabil meskipun kondisi yang di alami mereka saat ini berbeda dengan keadaan sebelumnya. Integrasi (integration) mengacu kepada pemeliharaan subsistem dalam keluarga petani. Keluarga merupakan suatu system sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan lainnya. Integrasi dalam masyarakat melibatkan ketiga komponen lainnya. Integrasi merupakan hal yang penting agar semua keluarga mampu bekerja sama dan saling membangun dalam melakukan strategi adaptasi sosial ekonomi. Hal itu dapat terlihat dari hasil temuan penelitian, dimana dalam mencapai tujuan dalam menstabilkan kondisi sosial ekonomi, setiap anggota keluarga baik istri ataupun anak ikut membantu dalam menstabilkan kondisi sosial ekonomi. Pemeliharaan (Latency) strategi-strategi yang dilakukan oleh masyarakat dipelihara dan diperbaharui sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur jalan tol di satu sisi memberikan dampak positif yang sangat baik yaitu efisiensi dan efektifitas dalam mobilitas masyarakat. Disamping itu juga berdampak pada produktifitas yang lebih baik. Namun demikian, juga menimbulkan beberapa dampak negatif berupa memudarnya tatanan segala sesuatu yang telah mapan. Walaupun hal ini sifatnya hanya sementara. Dampak negatif ini tentu saja dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pembangunan.

Hal demikian ini juga sangat dirasakan oleh berbagai lembaga keagamaan yang ada di Kota Semarang seperti masjid, sekolah, pondok pesantren dan majlis taklim. Menyelesaikan dampak ini tentu saja bukan persoalan yang mudah sehingga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Melainkan memerlukan keseriusan untuk memecahkannya.

Lembaga-lembaga keagamaan adalah bagian dari institusi sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk

ikut membangun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ketika lembaga-lembaga ini menghadapi persoalan terdampaknya pembangunan jalan tol tidaklah dirasakan sebagai sebuah persoalan yang meresahkan. Apalagi ditambah dengan begitu lekatnya lembaga tersebut dengan natur dasar agama yang sifatnya lebih mengedepankan harmoni daripada konflik.

Menyadari bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan, maka lembag-lembaga keagamaan tersebut kemudian menggunakan strategi adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter persoalan yang dihadapi. Strategi ini yang lebih penting adalah aspek-aspek yang mendasarinya seperti kohesi sosial yang tetap terjaga, menjadi media untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial, tetap terjaga efisiensi aktivitas, semakin meningkat kuantitas dan kualitas, tetap terjaganya integrasi pendidikan.

B. Saran-saran

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui salah satu aspek yang berkaitan dengan strategi adaptasi sosial lembaga0lembaga keagamaan di Kota Semarang. Secara praktis, hasil temuan dari penelitian ini bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga keagamaan yang lain sehingga juga ikut meningkat.

Namun demikian, masih perlu adanya penelitian lanjutan mengenai fenomena lembaga-lembaga keagamaan dalam menghadapi berbagai pembangunan

infrastruktur sehingga semakin melengkapi potret lembaga-lembaga Keagamaan.

BAB IV

STRATEGI LEMBAGA KEAGAMAAN MENGHADAPI DAMPAK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI KOTA SEMARANG

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, ada cukup banyak lembaga keagamaan yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol di Kota Semarang. Mereka harus berusaha secara cerdas menyikapi terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Tentu saja sebagai sebuah lembaga keagamaan, tidak bisa keluar dari citra diri lembaga yang membawa nilai-nilai agama dalam setiap kebijakannya. Dengan kata lain agama memainkan peran yang penting dalam menyikapi pengrusakan akibat adanya pembangunan jalan tol. Termasuk dalam hal ini adalah pilihan strategi yang dilakukan oleh lembaga keagamaan di Kota Semarang

A. Peran Agama dalam Membentuk Respon

Setiap masyarakat pasti akan mengalami perubahan, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, karena masyarakat pada dasarnya bersifat dinamis. Perubahan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti bidang

sosial, pendidikan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian dan lain sebagainya. Perubahan sosial yang terjadi memberi efek bagi masyarakat secara menyeluruh, perubahan di satu bidang akan diikuti perubahan di bidang lainnya. Salah satu bagian dari perubahan sosial terdapatnya pelapisan sosial dalam masyarakat. Efek yang ditimbulkan dari perubahan sosial masyarakat bisa berbentuk positif dan juga bisa berbentuk negatif. Dalam hal ini perlu ada benteng nilai dan norma yang bisa mengarahkan manusia dalam mengikuti perubahan sosial masyarakat yang terjadi dengan semakin pesat. Agama dalam konteks ini memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berbagai ragam fenomena dan fakta-fakta sosial, yang ada di dalamnya. Dalam pergaulan sosial di masyarakat munculnya berbagai kemajuan mempengaruhi perilaku dan pola bersikap warga masyarakat. Banyak perilaku-perilaku yang menyimpang yang ditemukan dalam masyarakat, yang pada tahap selanjutnya bisa mengganggu ketentraman masyarakat.

Keseimbangan sosial merupakan hal yang dicita-citakan oleh setiap warga masyarakat. Dengan keseimbangan di dalam masyarakat dimaksudkan sebagai suatu hal di mana lembaga-lembaga masyarakat yang pokok berfungsi dalam masyarakat dan saling berintegrasi. Keadaan demikian membuat warga masyarakat merasa aman dan tenteram, oleh sebab tidak adanya pertentangan pada aturan-aturan yang berlaku. Setiap kali ada gangguan terhadap adanya keseimbangan tersebut, maka masyarakat dapat menolaknya, atau merubahnya.

Lembaga-lembaga keagamaan seperti madrasah, masjid, pondok pesantren dan majlis taklim sebagai bagian dari institusi sosial mempunyai posisi yang strategis dalam hal ini. Strategis karena lembaga tersebut yang berusaha dengan sungguh-sungguh mengawal, menegakkan dan memertahankan nilai-nilai agama agar tetap eksis di masyarakat.

Masalah agama memang tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain :

1. Berfungsi Edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang. Kedua unsur tersebut mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

2. Berfungsi Penyelamat. Keselamatan yang diajarkan oleh agama adalah keselamatan yang meliputi bidang luas. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan meliputi dua alam yaitu dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan para penganutnya melalui : pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhan.

3. Berfungsi Sebagai Pendamaian. Melalui agama seseorang yang bersalah/berdosa dapat mencapai kedamaian

batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa

4. Berfungsi Sebagai Kontrol Sosial. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan social secara individu maupun kelompok karena : a. Agama secara instansi, merupakan norma bagi pengikutnya. b. Agama secara ajaran mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu, kenabian). c. Berfungsi Sebagai Pemupuk Rasa Solidaritas d. Berfungsi Tranformatif Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang/kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya berdasarkan ajaran agama yang dipeluknya itu kadang kala mampu mengubah kesetiaannya kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu. Ajaran agama mendorong dan mengajak penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.

5. Fungsi memupuk Persaudaraan. Kesatuan persaudaraan berdasarkan kesatuan sosiologis ialah kesatuan manusiamanusia yang didirikan atas unsur kesamaan.

- Kesatuan persaudaraan berdasarkan ideologi yang sama, seperti liberalism, komunisme, dan sosialisme.

- Kesatuan persaudaraan berdasarkan sistem politik yang sama. Bangsa-bangsa bergabung dalam sistem kenegaraan besar.

- Kesatuan persaudaraan atas dasar se-iman, merupakan kesatuan tertinggi karena dalam persatuan ini manusia bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja melainkan seluruh pribadinya dilibatkan dalam satu intimitas yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercayai bersama.

6. Fungsi transformatif. Fungsi transformatif disini diartikan dengan mengubah bentuk kehidupan baru atau mengganti nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru yang lebih bermanfaat.

7. Berfungsi Sublimatif. Ajaran agama Islam mengfokuskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat ukhrawi melainkan juga yang bersifat duniawi. Segala usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus karena dan untuk Allah merupakan ibadah. Selaian itu peran agama dalam masyarakat ditengah perubahan sosial yang terjadi juga berfungsi sebagai doktrin yang menjadi sumber nilai bagi pembentukan kepribadian, ideologi bagi gerakan sosial dan perekat hubungan sosial.¹

¹ Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern,,Jakarta:Kencana Pranada Media Group,2010, hlm.86.

Doktrin agama manapun yang dianut oleh komunitas manapun di belahan dunia ini mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi manusia yang baik manusia yang jujur, manusia yang memiliki kasih sayang, mencintai kedamaian dan membenci kekerasan dan lain sebagainya. Secara substansi ajaran agama memberikan kerangka norma yang tegas bagi tingkah laku umatnya, nyaris sulit ditemukan doktrin-doktrin agama wahyu yang tidak mengajarkan hal-hal yang baik kepada pemeluknya. Dalam menghadapi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat setiap pemeluk agama yang taat akan menggunakan doktrin ajaran agamanya untuk menghadapi segala kondisi yang ada dalam lingkungan kehidupannya, khususnya yang berhubungan dengan hal-hal yang negative sebagai hasil dari perubahan sosial yang ada.

Selanjutnya dalam kehidupan seorang individu sebagai makhluk sosial, Agama Islam dalam kehidupannya berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas ditengah gelombang terjadinya perubahan-perubahan sosial. Dalam membentuk sistem nilai dalam diri individu adalah agama segala bentuk simbol-simbol keagamaan, mukjizat, magis, maupun upacara ritual sangat berperan dalam proses pembentukan sistem nilai dalam diri seseorang. Setelah terbentuk, maka seseorang serta

merta mampu menggunakan sistem nilai ini dalam memahami, mengevaluasi, serta menafsirkan situasi dan pengalaman.

Dengan kata lain sistem nilai yang dimilikinya terwujud dalam bentuk norma-norma tentang bagaimana sikap diri. Nilai adalah daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Dilihat dari fungsi dan peran agama dalam memberi pengaruhnya terhadap individu baik dalam bentuk sistem nilai, motivasi maupun pedoman hidup, maka pengaruh yang paling penting adalah sebagai pembentuk kata hati. Pada diri manusia telah ada sejumlah potensi untuk memberi arah dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut antara lain insting, indra, nalar dan agama. Melalui pendekatan ini, maka agama Islam sudah menjadi potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendekatan ini, maka pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat.

Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik juga merupakan harapan. Agama Islam berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian, serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan agama sebagai nilai etik dan sebagai petunjuk bagi manusia karena dalam melakukan sesuatu tindakan seseorang

akan terikat kepada ketentuan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menurut ajaran agama yang dianutnya. Sebaliknya, agama juga sebagai pemberi harapan bagi pelakunya, dimana seseorang yang melaksanakan perintah agama umumnya karena adanya suatu harapan terhadap pengampunan atau kasih sayang dari sesuatu yang ghaib (supernatural).

Fakta sosial lainnya yang berkaitan dengan bahasan ini adalah menunjukkan bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki Stratifikasi sosial yang juga diistilahkan dengan pelapisan sosial adalah merupakan kedudukan yang berbeda-beda mengenai pribadi manusia yang merangkaikan suatu sistim sosial yang ada dan perlakuannya sebagai hubungan orang atasan dan orang bawahan satu sama lain dalam hal-hal tertentu dalam masyarakat.²Stratifikasi sosial juga menggambarkan bahwa dalam setiap kelompok masyarakat terdapat perbedaan kedudukan seseorang dari kedudukan yang tinggi dan rendah seolah-olah merupakan lapisan yang bersap-sap dari atas ke bawah.³Demikian juga halnya dengan seorang individu mempunyai kedudukan dan status yang berbeda dalam masyarakat. Manusia dalam kehidupan bersama disamping mengadakan interaksi individu tidak jarang pula terjadi interaksi status, bahkan dalam kehidupan sehari-hari individu melakukan interaksi dengan banyak orang dari berbagai status

²Darmawansyah,dkk, *Ilmu Sosial Dasar*, Surabaya,: Usaha Nasiona,1986l, hlm. 151

³Arnizun Hartomo, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001, hlm. 194.

tanpa mengenal pribadi lawan interaksinya.kondisi seperti ini disatu sisi bisa menyebabkan kesenjangan sosial antara masyarakat dalam hal ini norma-norma agama yang bisa meredamnya.Dalam setiap masyarakat tidak tergantung pada masyarakat dalam bentuk manapun senantiasa terdapat sikap penghargaan terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan.

Penghargaan yang tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal lainnya. Misalnya dalam masyarakat yang lebih menghargai kekayaan materil maka mereka yang lebih banyak mempunyai kekayaan materil akan menempati kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Gejala seperti ini menimbulkan lapisan masyarakat, yang merupakan perbedaan posisi atau suatu kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda.⁴ Namun tentunya hal ini sangat berbeda dengan ajaran agama, dimana tidak terdapat perbedaan perbedaan yang mencolok antara pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menurut norma ajaran agama, semua manusia adalah sama kedudukannya dalam pandangan Tuhan.

Pada dasarnya masyarakat yang memiliki sistim lapisan masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur.Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga dalam jumlah yang sangat banyak dianggap masyarakat berkedudukan dalam lapisan atasan dan

⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007, hlm.197.

mereka yang hanya memiliki sedikit sekali atau tidak memiliki sesuatu yang berharga dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Menurut Bossaerd dan Boll bahwa masyarakat itu pada awalnya terdiri dari small family (keluarga kecil) kemudian pada tahap selanjutnya menjadi masyarakat yang besar dan menjadi masyarakat yang berkelas-kelas. Menurut kelas sosial dalam masyarakat terdapat tiga yaitu : upper class, middle class dan lower class.⁵

Masyarakat dalam menjalankan interaksi sosialnya menpedomani norma-norma, seperti norma agama dan norma sosial yang ada pada masyarakat bersangkutan. Manusia sering mendapat sebutan sebagai “homo homini lupus” jika disalami hakikat kemanusiaan maka “homo homini lupus” dan stratifikasi sosial adalah merupakan suatu kesenjangan sekaligus tantangan bagi eksistensi kemanusiaan, pertanyaan ini dapat dijawab dalam pembicaraan tentang stratifikasi social.⁶ Ada tiga prinsip tentang stratifikasi sosial yaitu pertama : atribut kemanusiaan yang utama adalah akal pikiran yang membuatnya memandang kehidupan ini sebagai suatu rahasia yang harus dicarikan jawabannya, kedua atribut kebinatangan yang melekat pada manusia berupa nafsu menuntutnya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan menjadikan manusia tidak merasa puas atas apa yang telah diperolehnya. Ketiga ketidakpuasan

⁵Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung : Bina Cipta, 1977, hlm.16.

⁶Peter Berger, *Humanism Sociology*, Jakarta : Inti Sari, 1985, hlm. 120.

manusia atas apa yang dicapainya dalam dua bidang tersebut menyebabkan terjadinya perlombaan antara yang satu dengan yang lainnya untuk saling mendahului dan menguasai. Ketiga prinsip stratifikasi sosial ini misalnya sebagai fakta sosial tentu kalau berjalan tanpa adanya norma-norma yang dipedomani masyarakat bisa dibayangkan akan seperti apa bentuk kehidupan masyarakat bersangkutan untuk memenuhi ambisinya dan ketidakpuasannya terhadap apa yang diinginkannya, disinilah agama berperan yang menawarkan norma-norma dan nilai-nilai ideal bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosialnya.

Fakta sosial yang demikian yang pada umumnya terdapat dalam setiap bentuk masyarakat di satu sisi merupakan proses-proses sosial harus terus berjalan, maka dari itu peran agama sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya yang penuh dengan berbagai fakta sosial, agama dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan (way of life) setiap individu dalam masyarakat, sehingga bisa menghadapi efek yang ditimbulkan oleh adanya lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Penutup Agama dalam kehidupan sangatlah diperlukan dalam kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial baik secara cepat dan secara lambat. Masyarakat yang bersifat dinamis tidak bisa menolak yang namanya perubahan bahkan di satu sisi masyarakat itu juga membutuhkan perubahan sosial, namun dalam hal ini tentu harus ada peran yang bisa mengimbangi atau menjadi pedoman masyarakat dalam menyikapi perubahan sosial yang

terjadi. Salah satu bagian dari perubahan sosial adalah terjadinya lapisan sosial dalam masyarakat yang juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Agar dampak negatif dari perubahan sosial dan pelapisan sosial dalam masyarakat yang terjadi bisa diminimalisir bahkan diarahkan ke hal yang positif. Disinilah peran Agama Islam sangat sentral dalam menghadapi fenomena kehidupan manusia yang terus mengalami perubahan sosial yang semakin cepat, ditandai dengan kemajuan yang terjadi di berbagai bidang yang pada tahap selanjutnya memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan segala bentuk perubahan yang terjadi. Ibarat satu negara tidak akan bisa melangkah lebih jauh jika tidak ada rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman kemana arah perjalanan negara bersangkutan.

Organisasi dari masyarakat yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dibedakan menjadi tiga; institusi masyarakat lokal, organisasi yang bergerak berdasarkan motivasi, filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. Ketiga organisasi merupakan organisasi sosial yang tidak berafiliasi dari pemerintah, karena lahir atas prakarsa masyarakat sendiri dan di luar sektor swasta, sehingga bergerak bukan berdasarkan profit semata. Sebetulnya ketiga organisasi masyarakat ini merupakan organisasi yang melakukan pelayanan sosial dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Organisasi masyarakat yang bersifat local tumbuh sebagai bentuk aktualisasi dari pranata sosial dan sering pula didasarkan pada ajaran agama. Kondisi semacam ini, didorong oleh motivasi sosial dan religius. Realitas yang ada, terdapat organisasi local yang menjalankan sebagai pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan air minum, air irigasi, dan jaminan sosial seperti umbung paceklik, perumpulan kematian, dan pemeliharaan orang tua. Organisasi masyarakat banyak berorientasi pada ikatan lokalitas, ikatan keakraban, ikatan patron klien, prinsip timbal balik, dan solidaritas sosial. Organisasi yang berbasis masyarakat seperti ini biasanya memiliki kepemimpinan dan eksistensi yang kuat serta melibatkan banyak warga masyarakat dalam komunitas tertentu.

Walaupun organisasi ini bisa bergerak lebih fleksibel, tetapi pengelolaan terkadang tidak cukup efisien, sebab bersifat informal dan belum menggunakan manajemen yang rasional. Sesuai dengan karakteristiknya, institusi local dan tradisional memang efektif sebagai sarana mendorong sebuah kegiatan bersama. Organisasi masyarakat ini kurang efisien, dilihat dari sumber daya. Ini perlu sebuah pengembangan, tidak mengubah organisasi informal menjadi organisasi formal, tetapi tetap mempertahankan ikatan local dan kepemimpinannya. Organisasi ini perlu ditambah sumber

daya yang paham dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

Sekitar lingkungan masyarakat telah tumbuh juga organisasi sosial yang memberikan fungsi pelayanan sosial didorong prinsip filantropi. Organisasi ini ada yang sudah cukup populer di kalangan masyarakat luas dan tetap memberikan pelayanan secara terus-menerus, seperti PMR. Kelebihan organisasi ini adalah lingkup aktivitas pelayanan sosialnya tidak terbatas wilayah lokal dan keakraban saja. Kelemahannya adalah pola kegiatan yang temporer seperti menggalang bantuan bagi korban bencana alam. Perkembangan organisasi sosial ini membutuhkan dukungan keberadaan nilai kemanusiaan yang universal.

Masyarakat memiliki energi dan potensi yang luar biasa. Hanya saja aktualisasi kegiatannya masih bersifat insidental. Kegiatan penyaluran sosial seperti ini, sebetulnya juga baik untuk dilakukan dalam sehari-harinya, karena masyarakat terdapat berbagai masalah yang butuh perhatian intensif. Perkembangan positif dari organisasi perwujudan kepedulian sosial yang merupakan aktualisasi dari nilai filantropi. Pada mulanya pelaksanaan kepedulian sosial bersifat insidental dan karikatif, makin berkembang dan mudah untuk dijumpai.

Organisasi masyarakat perlu sebuah institusi perantara yang membantunya meningkatkan potensi masyarakat dalam menyalurkan bantuan berdasarkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial filantropi. Institusi perantara juga perlu modal dibidang penguasaan jaringan dan kepercayaan sebagai lembaga yang bergerak dibidang media massa dengan misi khusus dalam kesejahteraan sosial. Institusi perantara ini dapat membantu untuk menyampaikan persoalan kelompok penyandang masalah.

Sebagai institusi sosial yang bergerak dalam bidang keagamaan, keempat lembaga keagamaan yaitu Masjid Baitul Mustaghfirin, Ponpes YPMI al-Firdaus, TK Pembina ABA 54 dan Majelis Taklim Muhammadiyah Ngaliyan tidak mengalami persoalan yang serius, bahkan dengan agama bisa menerima kebijakan penggusuran karena kebijakan tersebut diarahkan menuju kebaikan.

B. Pola Strategi Lembaga Keagamaan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan orang lain maupun kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok. Untuk itu manusia membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru untuk dapat tetap

hidup. Sebagaimana diungkapkan oleh Gerungan pada bagian sebelumnya adaptasi merupakan suatu proses untuk mencapai keseimbangan dengan lingkungan. Konsep adaptasi berhubungan dengan mekanisme penanggulangan masalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam lingkungannya. Karena itu istilah adaptif dikaitkan dengan kemampuan penyesuaian diri manusia di dalam suatu lingkungan baru, tingkah laku adaptif harus dihubungkan dengan respon yang sesuai dengan penden, yang dimiliki dan dipilih oleh seseorang dalam pengambilan keputusan. Tingkah laku adaptif dapat diketahui dari proses adaptif individu dan kelompok individu, baik berkaitan dengan masalah lama maupun baru, tanpa disertai perasaan cemas. Di dalam adaptasi juga terdapat pola-pola dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Menurut Sugiyono pola adalah suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah menetap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam hal menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri.

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi, Gerungan (dalam Yan Eryanti Mussa 2006:5). Definisi lain dari adaptasi meminjam konsep yang dituangkan oleh Soemarwoto, bahwa adaptasi merupakan suatu upaya penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai kelenturan respon terhadap perubahan yang No Aspek

Pengamatan Ya Tdk 1. Adanya kesadaran untuk bersilaturahmi dengan keluarga non muslim. } 2. Interaksi yang harmonis dengan keluarga yang non muslim. } 3. Saling berbagi dengan keluarga yang non muslim. } 4. Saling mengerti antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. } 5. Saling menghormati saat melakukan kegiatan ibadah. } 6. Membantu keluarga non muslim yang sedang ditimpa musibah. } 7. Ikut berpartisipasi dalam acara keluarga besar. } 8. Kemampuan untuk memahami dan mengontrol diri sendiri. } 9. Kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik. } 10. Kemampuan untuk ikut berpartisipasi di keluarga besar. } 11. Memiliki hubungan interpersonal yang baik. }

9 terjadi pada perubahan lingkungan, Soemarwoto (dalam Yan Eryanti Mussa 2006:6). Dalam proses kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, individu tidak dapat begitu saja melakukan tindakan yang dianggap sesuai dengan dirinya, karena individu tersebut mempunyai lingkungan diluar dirinya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan lingkungan ini mempunyai aturan dan norma-norma yang membatasi tingkah laku individu tersebut. Penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial disebut dengan adjustment. Adaptasi lebih bersifat fisik, dimana orang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, karena hal ini lebih banyak berhubungan dengan diri orang tersebut. tingkah lakunya tidak saja harus menyesuaikan diri dengan lingkungan fisik, tetapi juga dengan lingkungan sosialnya (adjustment). Begitu juga

halnya dengan etnis tionghoa yang telah memeluk Islam, mereka juga berupaya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik atau lingkungan sekitarnya, termasuk melakukan adaptasi dengan keluarganya yang non muslim. Adaptasi perlu dilakukan, agar eksistensi seseorang dapat diakui dan diterima di lingkungan sekitarnya, tanpa adanya adaptasi akan membuat jurang pemisah/gap seseorang dengan masyarakat semakin besar. Parsudi Suparlan (dalam Ida Bagus Heri Jumawan, 2008:2011), mengatakan adaptasi itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan. Syarat-syarat dasar tersebut mencakup: (a) Syarat dasar alamiah-biologi (manusia harus makan dan minum untuk menjaga kesetabilan temperatur tubuhnya agar tetap berfungsi dalam hubungan harmonis secara menyeluruh dengan organ-organ tubuh lainnya). (b) Syarat dasar kejiwaan (manusia membutuhkan perasaan tenang yang jauh dari perasaan takut, keterpencilan gelisah). (c) Syarat dasar sosial (manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, tidak merasa dikucilkan, dapat belajar mengenai kebudayaannya, untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh). Adaptasi sosial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa Muslim terhadap keluarganya yang non Muslim, merupakan salah satu contoh bahwa setiap manusia butuh pengakuan dari lingkungan sosialnya, karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Maka dari itu setiap manusia akan berupaya agar ia dapat diterima lingkungan sosialnya.

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan percepatan ekonomi nasional, salah satunya melalui pembangunan. Pembangunan nasional yang merata dan berlandaskan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti yang tertuang dalam ayat lima, dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Pembangunan dan pemerataan di seluruh Indonesia, diupayakan oleh negara dalam menjawab persoalan-persoalan bangsa, terutama persoalan infrastruktur sebagai sarana percepatan pembangunan dan ekonomi negara menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian, negara selalu berusaha mewujudkan cita-cita tersebut dengan semakin gencar melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus di pulau Jawa, melainkan menjangkau seluruh kawasan Terluar, Terdalam, dan Tertinggal (3T). Gencarnya pembangunan nasional memang menjadi fokus program kerja presiden dan seluruh jajarannya dari periode ke periode, terutama saat ini pembangunan infrastruktur secara masif terlihat pada pemerintahan presiden Joko Widodo-Jusuf Kala.

Pemerintah dengan segala upaya melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur negara, terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional, sebagai bukti target pembangunan nasional. Dalam peraturan pemerintah tersebut, ada sepuluh komponen pembangunan strategis yang berusaha

diwujudkan oleh pemerintah, yaitu pembangunan infrastruktur jalan tol, infrastruktur jalan nasional atau strategis nasional non-tol, pembangunan infrastruktur sarana dan pra-sarana kereta api antar kota, infrastruktur kereta api dalam kota, revitalisasi bandar udara, bandar udara baru, bandar udara strategis lainnya, pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas, program satu juta rumah, pembangunan kilang minyak, pembangunan pipa gas atai minyak LPG, infrastruktur energi asal sampah, penyediaan infrastruktur air minum, pembangunan tanggul penahan banjir, pembangunan bendungan dan beberapa infrasturtur pendukung lainnya.

Dari sekian banyak program pembangunan strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintahan era Joko Widodo-Jusuf Kalla tersebut di atas, peneliti akan membatasi dengan pembahasan pada pembangunan jalan tol yang sempat menjadi kajian dan perbincangan dalam masyarakat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dan ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan diubah kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, bahwa dalam rangka percepatan perwujudan pengusaha jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara financial, Pemerintah dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan pengusaha jalan tol.

Pembangunan jalan tol dilakukan di beberapa provinsi besar di Indonesia sebagai upaya untuk kemudahan mobilisasi perekonomian yang diharapkan nantinya agar berimbas pada percepatan ekonomi nasional. Di satu sisi, pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah juga berimbas pada masyarakat dan aspek pertanian, karena pembangunan jalan tol telah memakan lahan masyarakat yang tidak sedikit. Penggusuran sekian banyak lahan, bangunan, rumah, dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai konsekuensi logis diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Jalan Tol. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pembangunan bertujuan mewujudkan konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, dengan memperhatikan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam persoalan ini, menarik membahas dampak pembangunan jalan tol Batang-Semarang yang tak sedikit menyebabkan persoalan sengketa pembebasan lahan yang terjadi, seperti halnya kasus di Kabupaten Kendal, yang sampai berdampak pada banyaknya warga Kendal yang harus mengungsi di kompleks DPRD Kabupaten Kendal. Dari hal tersebut, yang menarik dan perlu dikaji secara mendalam adalah penggusuran lembaga-lembaga keagamaan yang terjadi sebagai akibat pembangunan jalan tol Batang-Semarang. Oleh karena persoalan di atas, peneliti akan meneliti beberapa

lembaga keagamaan di kota Semarang yang terkena dampak pembangunan jalan tol sebagai bagian dari kebijakan nasional yang tidak bisa dihindarkan.

Pada akhirnya, walaupun lahan dan fisik bangunan pengganti masjid baitul Mustaghfirin yang baru sudah proses pembangunan, dengan ukuran lahan dan bangunan yang menurut pengurus takmir lebih luas dan lebih baik dari sebelumnya. Namun demikian, salah satu pengurus takmir, Qosim, berharap di tempat yang baru nantinya masyarakat akan lebih rajin dan nyaman beribadah di masjid tersebut. Walaupun belum bisa digunakan, dia berharap agar bangunan yang baru bisa segera terselesaikan, karena letak tentunya lebih strategis karena letaknya dekat dengan akses jalan utama dan dekat dengan pemukiman warga. Di satu sisi, letak masjid baru dirasa tidak berpindah jauh dari lokasi yang sebelumnya, yang diharapkan pengurus takmir tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan yang ada.

Secara karakteristik masyarakat, dirasakan Qosim tidak ada perbedaan. Karena menurutnya, lahan baru yang didapat pengurus takmir tidak jauh dari lokasi lama dan masih dalam satu wilayah. Hal tersebut, menyebabkan tidak ada perbedaan signifikan karakteristik lingkungan lama dengan yang baru. Dalam beradaptasi pun, menurutnya masyarakat tentunya tidak ada kesulitan, karena masih dalam struktur dan kultur masyarakat yang sama.

Keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan

Strategis Nasional mengharuskan relokasi ponpes YPMI Al-Firdaus ke lokasi yang baru, Gondoriyo, Beringin, Semarang, yang semula terletak di jalan Honggowongso, Ngaliyan, Semarang. Digusurnya lokasi ponpes YPMI Al-Firdaus sebagai akibat pembangunan jalan tol Batang-Semarang, tentu tidak dianggap sebagai musibah oleh pengurus pondok. Bahkan, menurut Sugeng, salah satu pengurus mengungkapkan bahwa adanya penggusuran ini malah membawa berkah bagi pondok. Mengapa demikian? Karena menurutnya, lahan lama dirasa kurang strategis melihat lahan tidak rata dan luasnya juga terbatas dan menghambat upaya renovasi dan pengembangan pondok.

Pembangunan infrastruktur Nasional oleh pemerintah dalam pembangunan jalan tol, yang berakibat tergusurnya banyak lahan, bangunan, dan lembaga keagamaan termasuk ponpes YPMI AL-Firdaus disikapi positif pihak pengurus. Pihak ponpes merasa diuntungkan, karena dengan demikian bisa mencari lahan yang lebih strategis ketimbang lahan yang lama. Pada akhirnya, mendapat lahan baru di daerah Gondoriyo, Beringin, yang dirasa lebih strategis dan luas serta memudahkan pengurus untuk melakukan pengembangan.

Beberapa pertimbangan sebelum penggusuran sempat dipikirkan matang-matang oleh pengurus untuk jalan keluar agar santri tidak merasa keberatan direlokasi oleh pihak pengurus ponpes, seperti: pertimbangan dekat dengan kampus, dekat akses jalan umum, tempat lebih strategis, dekat dengan rumah beberapa pengurus dan pengelola ponpes. Setelah

dipertimbangkan banyak hal tersebut, maka lahan yang baru ini, yang didapatkan oleh pengurus dirasa pihak pondok sangat cocok dan lebih baik dari sebelumnya. Selain hal tersebut, jalan keluar lainnya dilakukan pengurus pondok, yakni memperluas lahan ponpes, yang semula 1000 meter menjadi 4000 meter. Sugeng menjelaskan bahwa dana ganti lahan lama hanya cukup untuk membeli lahan baru yang luasnya mencapai empat kali lipat tersebut. Pembangunan fisik bangunan yang dilakukan, menurutnya diantisipasi dengan mencari bantuan dari pengurus maupun pihak luar. Hasilnya sumbangan didapatkan oleh pengurus sebagai modal awal membangun pondok untuk menampung dan sebagai tempat tidur santri. Bantuan selanjutnya berupa Gazebo yang didapat dari salah satu pengurus ponpes sendiri sebagai aula kegiatan. Sampai pada akhirnya, mendapatkan bantuan dua gedung baru, masing-masing dari dana bantuan Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG RI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (KEMENPORA). Bangunan fisik tersebut, menurut pengurus ponpes sebagai dampak positif penggusuran yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan ponpes YPMI Al-Firdaus agar kedepannya diharapkan bisa lebih baik dan mampu mencetak santri-santri berkualitas.

Relokasi ponpes YPMI Al-Firdaus dari lokasi lama ke lokasi yang baru dirasakan menjadi berkah tersendiri bagi pengurus ponpes maupun santri, hal ini ditegaskan oleh Sugeng, Menurutnya, dengan lahan yang baru ini, pihak ponpes bersyukur karena bisa mengembangkan pondok agar lebih baik

dari segi tempat, kualitas dan kuantitas santri, serta kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Sugeng, dibanding tempat yang lama, tempat yang baru sekarang ini lebih strategis dan lebih bisa membaur dengan masyarakat. Alasan itu diungkapkannya karena lokasi yang lama kurang strategis dan terletak agak dipojok, yang menyebabkan akses ke masyarakat juga terbatas, disampingnya juga dihimpit sekolahan dan makam yang menyebabkan terbatasnya santri membaur di masyarakat.

Lokasi yang baru di daerah Silayur, diungkapkan sebagai tempat yang sangat strategis dalam sisi apapun, maka dia berharap santri bisa lebih meningkatkan aktivitas sosialnya. Dekat dengan masyarakat menjadi alasan utama santri harus bisa membaur dengan baik di masyarakat sekitar. Menurut pengamatannya, selama berada di lokasi baru ini, dilihat santri tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Apalagi, menurut Sugeng, masyarakat sekitar ponpes YPMI Al-Firdaus juga dianggap bisa *guyub* dengan santri dan memang sebelum bangunan pondok jadi dan adanya rencana pembangunan ponpes, masyarakat sekitar sudah menerima baik adanya rencana pembangunan ponpes di wilayah tersebut. Jadi, setelah santri menetap di lahan yang baru tersebut, tidak ada kendala yang memberatkan santri, terutama dalam beradaptasi dengan masyarakat yang notabene baru bagi mereka.

Selain itu, RT dan RW sekitar juga ada kepedulian dengan pondok. Bahkan Sugeng menuturkan, bahwa RT

lebaran tahun 2018 juga ikut memantau wilayah ponpes yang rata-rata ditinggalkan oleh santri yang mudik lebaran. Kondisi sosial-keagamaan yang baik dan mendukung pihak ponpes, membuat seluruh kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh santri, baik santri putra maupun santri putri sangat antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan oleh pengurus pondok. Dibanding lokasi ponpes yang lama, terbatas lahan dan penerimaan santri pun terbatas dan hanya bisa menampung sekitar 50 santri. Sedangkan, lahan yang baru diungkapkan lebih baik karena lebih luas, dan tentunya bisa menampung lebih banyak santri untuk didik kecerdasan intelektual dan spiritualnya agar membentuk santri yang berakhlak mulia, cerdas, dan bermanfaat di masyarakat.

Tindakan strategi adaptasi sosial ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, memiliki korelasi dengan teori structural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott parson. Hal itu dikarenakan, masyarakat merupakan suatu sistem sosial dengan subsistem- subsistem yang saling berkaitan dan berhubungan. Subsistem subsistem yang ada di dalam masyarakat mengalami perubahan diakibatkan oleh pembangunan. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, ditujukan untuk mencapai keadaan seimbang dan teratur. Masyarakat akan senantiasa berusaha untuk menstabilkan keadaan yang berubah. Salah satunya adalah menstabilkan kebutuhan dalam bidang sosial ekonomi. Oleh karena itu, dalam mempertahankan elemen tersebut agar tetap stabil, maka masyarakat melakukan empat prasyarat mutlak diantaranya

yaitu adaptasi, *goal attainment*, integrasi dan latency. (Ritzer,G, dan Gouglas, J, 2011). Adaptasi (*adaptation*) dilakukan oleh petani dengan cara melakukan penyesuaian diri dengan kondisi lingkungan dan sumber daya yang berubah. Penyesuaian dilakukan dengan berbagai cara dan strategi baik aktif, pasif dan jaringan sosial. Tujuan dari strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak lain adalah untuk memenuhi tujuan. Tujuan tersebut adalah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan agar mendapatkan kehidupan yang tetap stabil meskipun kondisi yang di alami mereka saat ini berbeda dengan keadaan sebelumnya. Integrasi (*integration*) mengacu kepada pemeliharaan subsistem dalam keluarga petani. Keluarga merupakan suatu system sosial yang terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan dan berinteraksi satu dengan lainnya. Integrasi dalam masyarakat melibatkan ketiga komponen lainnya. Integrasi merupakan hal yang penting agar semua keluarga mampu bekerja sama dan saling membangun dalam melakukan strategi adaptasi sosial ekonomi. Hal itu dapat terlihat dari hasil temuan penelitian, dimana dalam mencapai tujuan dalam menstabilkan kondisi sosial ekonomi, setiap anggota keluarga baik istri ataupun anak ikut membantu dalam menstabilkan kondisi sosial ekonomi. Pemeliharaan (*Latency*) strategi-strategi yang dilakukan oleh masyarakat dipelihara dan diperbaharui sesuai dengan keadaan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur jalan tol di satu sisi memberikan dampak positif yang sangat baik yaitu efisiensi dan efektifitas dalam mobilitas masyarakat. Disamping itu juga berdampak pada produktifitas yang lebih baik. Namun demikian, juga menimbulkan beberapa dampak negatif berupa memudarnya tatanan segala sesuatu yang telah mapan. Walaupun hal ini sifatnya hanya sementara. Dampak negatif ini tentu saja dirasakan oleh masyarakat yang terdampak pembangunan.

Hal demikian ini juga sangat dirasakan oleh berbagai lembaga keagamaan yang ada di Kota Semarang seperti masjid, sekolah, pondok pesantren dan majlis taklim. Menyelesaikan dampak ini tentu saja bukan persoalan yang mudah sehingga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Melainkan memerlukan keseriusan untuk memecahkannya.

Lembaga-lembaga keagamaan adalah bagian dari institusi sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk ikut membangun kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ketika

lembaga-lembaga ini menghadapi persoalan terdampaknya pembangunan jalan tol tidaklah dirasakan sebagai sebuah persoalan yang meresahkan. Apalagi ditambah dengan begitu lekatnya lembaga tersebut dengan natur dasar agama yang sifatnya lebih mengedepankan harmoni daripada konflik.

Menyadari bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan, maka lembaga-lembaga keagamaan tersebut kemudian menggunakan strategi adaptasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter persoalan yang dihadapi. Strategi ini yang lebih penting adalah aspek-aspek yang mendasarinya seperti kohesi sosial yang tetap terjaga, menjadi media untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial, tetap terjaga efisiensi aktivitas, semakin meningkat kuantitas dan kualitas, tetap terjaganya integrasi pendidikan.

B. Saran-saran

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui salah satu aspek yang berkaitan dengan strategi adaptasi sosial lembaga0lembaga keagamaan di Kota Semarang. Secara praktis, hasil temuan dari penelitian ini bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga keagamaan yang lain sehingga juga ikut meningkat.

Namun demikian, masih perlu adanya penelitian lanjutan mengenai fenomena lembaga-lembaga keagamaan dalam menghadapi berbagai pembangunan infrastruktur sehingga semakin melengkapi potret lembaga-lembaga Keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Abdulah, *Agama dalam perspektif Sosiologi Antropologi*, STAIN Cirebon: 2005.

Beilharz, Peter, *Teori-teori Sosial Ocervasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yoagyaarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Berger, Peter L., *Humanism Sociology*, Jakarta : Inti Sari, 1985.

Ekasetya, Mohammad Paurindra. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum: Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2015.

Giddens, Anthony, *Problematika Utama dalam Teori Sosial, Aksi Struktur dan Kontradiksi dalam Analisis Slosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009

Hartomo, Arnizun, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2001.

Hassan Hanafi dkk., *Islam dan Humanisme Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal*, Yoagyaarta: Pustaka Pelajar, 2007,

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Ikbar, Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, Jakarta:Kencana Pranada Media Group, 2010.

Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

O'Dea, Thomas F., *Sosiologi Agama* Terj. Yasogama, Jakarta : Rajawali, 1992.

Presiden (Perpres) No. 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Prihatin, Rohani Budi. “Fenomena Penggusuran di Jakarta.” *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* Vol. VI, No. 17/I/P3DI/Sept/2014.

Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2013.

Rahmat, Jalaluddin, *Psikologi Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ranjabar, Jacobus, *Perubahan Sosial, Teori0teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*, Bandung: Alfabeta, 202017

Ritzer, George, *Teori Sosial Postmodern*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Rudyansjah, Rudy, *Emile Durkheim*, Jakarta: Kompas, 2015

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

Susanto, Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Bandung : Bina Cipta, 1977.

Suwaty, Paula, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Proaktif Masyarakat Dalam Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera: Studi Kasus di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Usman, Sunyoto, *Esai-esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015

-----, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Wirawan IB, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2016

Weber. Max, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Zaman, Ali Noer (ed), *Agama untuk Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016

Chairuddin Rais (2003). Pembauran Kelompok Etnis Tionghoa Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, Pontianak : Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Yan Eryanti Mussa, (2006). Pola Adaptasi Nelayan Dalam Menghadapi Kenaikan Harga BBM (Studi Masyarakat Nelayan Motorisasi di Desa Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Pontianak. Pontianak : Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak..

Ida Bagus Heri Juniawan, (2008). Pola Adaptasi Masyarakat Bali di Perantauan (Studi Tentang Kounitas Bali Di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat), Pontianak: Tesis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Leo Suryadinata, (1994). Politik Tionghoa Peranakan Di Jawa. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.

Lie Sau Fat, (2008). Aneka Budaya Tionghoa Kalimantan Barat. Penerbit Muare Public Relation : Pontianak.

Lotfiansyah, (2004). Proses pembauran etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi di kota Pontianak studi perspektif komunikasi : Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

M.D. Laode, (1997). Tiga Muka Etnis Cina. PT. Bayu Indra Grafika : Yogyakarta.

M.D. Laode, (2012). Etnis Cina Indonesia Dalam Politik. Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.

M.Hidayat, (1993). Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia. Penerbit Tarsito : Bandung.

Melly G Tan, (2008). Etnis Tionghoa di Indonesia. : Pustaka Obor Indonesia : Jakarta.

Fatmawati (2000). Solidaritas Sosial Orang Cina Muslim dengan Non Muslim dan Fakkor-FaktorYang mempngaruhinya (Studi di Kotamadya Pontianak Propinsi Kalimantan Barat), Bandung : Tesis Universitas Padjajaran Bandung.

Harry Purwanto, (2005), Orang Cina Khek Dari Singkawang. Penerbit Komunitas Bambu : Depok.